

BAB IV

TAN MALAKA DAN REVOLUSI INDONESIA

A. Latar Belakang Kehidupan Tan Malaka

Tan Malaka merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dapat dikatakan kontroversial baik dari sisi perjuangan maupun pemikirannya. Kontroversi tersebut tidak terlepas dari pandangan ataupun pendapat masyarakat yang masih menganggap Tan Malaka sebagai orang yang beraliran kiri sehingga dianggap membahayakan kesatuan dan kelangsungan perjuangan bangsa. Tidak heran bahwa peran dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terkadang atau sengaja di kaburkan bahkan dihilangkan untuk sebuah alasan tertentu.

Dalam tradisi politik, kiri biasanya dianggap sebagai ideologi perlawanan bagi kelompok reaksioner yang dalam gerakannya mengklaim sebagai kelompok yang memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas. Selain itu terkadang kiri juga diidentifikasi dengan para penganut ajaran Marxis. Menurut Hugh Pucell untuk menetapkan kiri dan kanan itu cukup sulit dan bersifat ambivalen, yang pengertiannya bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Suatu pandangan politik dalam situasi dan konteks tertentu dapat dikatakan kiri namun pada saat yang lain bisa dikatakan kanan (Rambe, 2003 : viii). Dengan adanya ambivalensi tersebut terkadang sulit untuk dapat mendudukan sosok Tan Malaka dalam Sejarah Indonesia.

Sutan Ibrahim datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 juni 1897 (Susilo, 2008 : 12). Desa Pandan Gadang tersebut terletak lebih kurang 33 km di utara kota Payakumbuh, atau 158 km dari kota Padang, dan sekitar 8 km dari Suliki. Tidak ada ada catatan resmi dan meyakinkan mengenai tanggal lahir Tan Malaka, Djamiludin Tamim menulis tanggal 2 Juni 1897, selain itu Peoze menemukan data tahun kelahiran Tan Malaka yang berbeda: 1893, 1894, 1895, 1896, dan 1897. Poeze cenderung untuk menganggap tahun 1897 sebagai tahun kelahiran Tan Malaka yang paling tepat melihat fakta bahwa pada tahun 1903 ia mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Maka, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika itu ia berusia kurang lebih 6 tahun.

Ayah Tan Malaka bernama Rasad berasal dari puak Chaniago, sedangkan ibunya bernama Sinah berasal dari puak Simabur. Tan Malaka merupakan sulung dari dua bersaudara. Adiknya bernama Kamaruddin enam tahun lebih muda dari Tan Malaka (Seri Buku Tempo, 2010 : 93).

Menurut Sakti Agra ayah Tan Malaka bekerja sebagai Mantri Suntik atau Vaksinator, sedangkan menurut Kamaruddin mengatakan bahwa ayahnya bekerja sebagai mantri yang bertugas mengatur distribusi garam di kampungnya (Seri Buku Tempo, 2010 : 96). Berbeda dengan yang dikatakan Taufik Susilo yang mengatakan bahwa ayah Tan Malaka bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda, sehingga dapat dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan masyarakat lainnya (Susilo, 2008 : 12).

Tan Malaka semasa kecil menghabiskan waktunya di kampung halaman, ia tinggal bersama keluarganya pada sebuah rumah gadang lengkap dengan lumbung padi, surau, dan beberapa kolam ikan. Tan Malaka dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin dan sedikit nakal, kenakalannya tersebut ia gambarkan dalam buku memoarnya Dari Penjara ke Penjara :

Beberapa tahun belakang dimasa kanak-kanak ketika nafas masih lemas, kaki dan tangan masih lemah, saya diajak oleh seorang teman olahraga berenang menyebrangi sungai Ombilin, maka tewaslah nafas, kaki dan tangan itu, hilanglah ingatan dombang-ambingkan ombak yang deras. Untunglah ada teman yang besar disamping dan segera memberi pertolongan. Setelah ingat kembali, tiba-tiba saya sudah berada didepan rotannya ibu saya yang siap hendak memukul sebagai pelajaran (Malaka, 2007 : 21).

Selain hukuman yang diberikan ibunya terkadang ia pun mendapatkan hukuman dari Guru Gadang di kampungnya yang sering memberinya hukuman pilin pusar, bahkan kerap ia merasa selalu menjadi anak yang paling dipersalahkan dan satu-satunya yang dihukum.

Sampai sekarang saya masih heran kenapa saya saja yang menjadi sasaran pilin pusar (Cabut Pusar). Sekali lagi dilakukan dibelakangkari karena saya hampir hanyut pula [.....], permainan perang jeruk berakhir dengan perang batu antara anak sekolah Tanjung Ampalu dan anak dari kampung Tanjung, maka yang harus menerima hukuman sebagai penjahat perang saya juga (Tan Malaka, 2007 : 21-22).

Sekitar tahun 1903 – 1908 Tan Malaka belajar disekolah Kelas Dua Suliki (Rambe, 2003 : 20). Kecerdasan yang ditunjukkannya membuat guru- gurunya berkeinginan agar Tan Malaka melanjutkan sekolahnya. Tan Malaka kemudian melanjutkan studinya di Kweekschool Fort de Kock, Bukittinggi atau lebih dikenal sebagai Sekolah Raja. Rudolf Mrazek dalam Seri Buku Kompas menyebut Fort de Kock merupakan rantau pertama Tan Malaka. Di sini ia

berkenalan dengan budaya negeri penjajah. Dia belajar bahasa Belanda dan juga tergabung dalam orkes sekolah sebagai pemain Cello.

Selama di Sekolah Raja Tan Malaka dikenal juga sebagai murid yang cerdas, sehingga beberapa guru seperti G.H . Horensma mengusulkan agar Tan Malaka melanjutkan studinya ke negeri Belanda. (Rambe, 2003 : 21). Setelah tamat *Kweekschool* Bukit Tinggi, atas bantuan Horensma dengan pinjaman biaya dari *Engkufonds* Tan Malaka meneruskan pendidikannya ke *Rijks Kweekschool* di Haarlem, Nederland.

Selama sekolah di Harleem, Tan Malaka sempat beberapa kali berpindah tempat. Pertama kali datang ia tinggal di asrama pondokan bersama murid *Rijks Kweekschool* lainnya, namun karena tidak merasa betah akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke *Jacobijnestraat* dan tinggal di sebuah kamar sewaan milik sebuah keluarga Belanda yang bernama *Van der Mij*. Kondisi rumah yang ditematinya digambarkan dalam Penjara ke Penjara sebagai berikut “Dalam rumah sewaan seorang keluarga buruh, sebuah rumah kecil di jalan kecil, kebetulan pula bernama *Jacobijnestraat*, saya mendiami kamar loteng yang sempit gelap” (Malaka, 2007 : 28).

Pondokan di *Jacobijnestraat* adalah tempat berseminya pemahaman politik Tan Malaka. Dia kerap terlibat diskusi bersama teman kos lainnya, Herman Wouters seorang pengungsi asal Belgia dan juga Van der Mij. Dari diskusi itu Tan Malaka sadar bahwa dunia tengah bergejolak, dan sekonyong- konyong sebuah kata baru mulai jadi subjek misterius bagi Tan Malaka yaitu : Revolusi (Seri Buku Tempo : 106).

Selama tinggal di Belanda, Tan Malaka kerap sekali sakit akibat makanan dan iklim Belanda yang tidak cocok, serta menderita Pleuritis (Susilo : 2008 : 15). Dengan kualitas makan yang buruk, kamar yang tak sehat, dan tak pernah mengenakan jaket tebal, Tan Malaka mulai terserang radang paru-paru tepat pada musim panas 1915. Sejak itu dia tak pernah seratus persen sehat. Pada 1916 kesehatannya mundur lagi sehingga sulit untuk mengikuti pelajaran sekolah. Bahkan ujian pun dilaluinya dalam kondisi tidak sehat.

Hal tersebut menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan ia berpindah-pindah tempat. Pada tahun 1916, Tan Malaka meninggalkan Harleem dan pindah ke Daerah Bussum dan tinggal bersama keluarga Rietze Koopmans. Kepindahannya ke Bussum membuat Tan Malaka kembali tersadar bahwa hidup tak sekedar penjajah dan terjajah. Di kota ini ia menemukan pola Borjuis yang berjurang luas dengan Proletar. Dia merasakan perbedaan hidup yang mencolok antara Van der Mij dengan Koopmans.

Pada tahun 1917 terjadi Revolusi Komunis di Rusia yang dipimpin partai Bolsyevik untuk menggulingkan Tsar. Revolusi tersebut mengakibatkan terciptanya embrio masyarakat baru, di mana kaum pekerja atau buruh menguasai proses produksi dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat sendiri. Peristiwa tersebut telah meradikalisasi mereka, bahwa kelas buruh dan rakyat tertindas harus mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan kaum penguasa. Revolusi yang terjadi di Rusia tersebut turut serta memberi keyakinan dalam diri Tan Malaka mengenai bagaimana seharusnya negaranya dibangun.

Revolusi memberi keyakinan pada jiwa yang masih ribut dalam taufan pergolakan thesis, anti thesis, bahwa masyarakat seluruhnya sedang beralih

ke Sosialisme. Lama atau sebentar Sosialisme mungkin bisa terpukul disana- sini, tetapi sebagai balance perhitungan masyarakat dunia seluruhnya mesti menjauhi Kapitalisme dan mendekati Sosialisme (Malaka, 2007 : 34).

Pasca pecahnya Revolusi Komunis di Rusia, Tan Malaka banyak membaca buku yang berkaitan dengan Revolusi di dunia seperti, “ *De franshe Revolutie*” (*De Grote Franche Om Wenteling*) karangan Carlyle habis dibacanya. Juga karya filosof Jerman Friederich Nietzsche “ *De Grote Denkers der eeuwen*” dan “ *Friderich Nietzsche : Zoo Sprak Zarathustra*” habis dibacanya (Rambe, 2003 : 22). Selain itu seperti menurut penuturannya, ia pun berkenalan dengan buku- buku Marx Engels seperti “*Het Capital*” terjemahan Van der goes, “ *Marxistische Economie*” oleh Karl Kautsky dll. Tan Malaka menyebut bahwa Nietzsche sebagai *Thesis*, Rosseau sebagai *Anti Thesis*, dan Karl Marx sebagai *Synthesis* (Malaka, 2007 : 32).

Pada tahun 1918, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Dr. Gunawan, meminta Tan Malaka untuk menjadi wakil *Indische Vereeniging* dalam Kongres Pemuda Indonesia dan Pelajar Indologie di Deventer serta memberikan pendapatnya tentang pergerakan Nasional di Indonesia. Di Forum inilah Tan Malaka untuk pertama kalinya menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikirannya secara terbuka.

Pada tahun 1919, Tan Malaka pindah ke *Goilandscheweg* yang merupakan tempat para borjuis tinggal, sehingga tidak heran dikanan-kiri terdapat banyak rumah peristirahatan yang cantik dan jaraknya berjauhan. Di tempat ini Tan Malaka mulai putus asa karena tidak lulus dalam ujian untuk ijin mengajar sebagai guru di Belanda. Padahal dia sangat memerlukan pekerjaan itu untuk

membayar hutang- hutangnya yang lumayan banyak. Pada saat yang sama Tan Malaka pun semakin aktif untuk mengunjungi rapat-rapat yang dilakukan oleh *Indische Veereeninging*.

Sebagai anak dari bangsa yang saat itu masih dijajah, Tan Malaka merasa sudah saatnya untuk memulai Revolusi di Indonesia dan membangun masyarakat yang bersendikan Sosialisme. Tan Malaka memang gagal mendapatkan ijin mengajar di negeri Belanda, tetapi ia banyak mendapat pelajaran tentang politik di negeri Belanda.

Perang Dunia I sudah selesai, Tan Malaka pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Tan Malaka mendapat pekerjaan sebagai pembantu pengawas semua sekolah di Senembah Mij, satu dari Onderneming terbesar di Deli. Pertama kali Tan Malaka sangat senang ketika mendapat pekerjaan ini yang dilukiskannya seperti berikut :

Saya akan menerima uang persediaan (uitrustinggeld) f. 1500,- dijanjikan gaji f. 350,- sebulan; mendapat rumah; air; listrik; dan kendaraan prei [.....], dpandang dari sudut keuangan, maka dalam perjalanan pulang saya ke Indonesia itu saja, saya sudah sanggup mendapatkan uang yang harganya hampir bisa menyelesaikan hutang saya dengan engkufond (Malaka, 2007 : 43-44).

Ditengah kehidupan perkebunan yang yang benar-benar kapitalistis dan rasistis, kedudukan Tan Malaka pun menjadi sulit. Ia dibayar atas dasar norma-norma Eropa, tetapi teman-teman Belandanya melihat dirinya dengan sebelah mata, sedang pekerjaannya selalu dianggap remeh (Poeze, 2009 : xvi). Hal tersebut yang akhirnya menegaskan keyakinan politiknya akan ketidakadilan yang dialaminya sekaligus semakin semakin menebalkan tekadnya untuk berjuang merebut hak- hak rakyat yang diperkosa oleh penjajah.

B. Aspek – aspek yang Membentuk Pemikiran Tan Malaka

Menjelaskan latar belakang pemikiran dari seseorang tidak akan terlepas dari latar belakang kehidupan tokoh itu sendiri. Karena pemikiran itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya sebuah interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam mengurai latar belakang pemikiran Tan Malaka, penulis mengajukan sebuah pendapat bahwa terdapat 3 Aspek yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Struktur Kognisi Tan Malaka yaitu, 1). Aspek Budaya, 2). Aspek Pendidikan, 3). Aspek Realitas

1. Aspek Budaya

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang mendiami sebahagian besar pulau Sumatra bagian tengah, mereka dikenal sebagai masyarakat yang dinamis dan mudah menerima pembaharuan tetapi masih tetap memegang teguh adat istiadatnya (<http://konselingindonesia.com>). Suku Minangkabau (orang Minang), merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan ADAT MINANGKABAU. Dapat dikatakan bahwa Adat Minang adalah merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah.

Dalam adat Minangkabau terdapat beberapa ketentuan yang memberikan ciri khas kepada adat Minang sebagai falsafah dan pandangan hidup. Ketentuan itu adalah fatwa-fatwa adat Minang berdasarkan ketentuan alam nyata yang merupakan pengintegrasian antara unsur adat dan juga unsur agama. Adapun tahapan dalam pemngintegrasian tersebut adalah :

1. Tahap pertama adalah tahap adat *basandi alua jo patuik dan syarak basandi dalil*. Dalam tahap ini adat dan syarak jalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang mengamalkan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan bidang sosial mereka memberlakukan adat.
2. Tahap kedua adalah *adat basandi syarak dan syarak basandi adat*. Dalam tahap ini salah satunya menuntut hak mereka kepada pihak lain sehingga keduanya sama-sama dibutuhkan tanpa ada yang tergeser. Pada tahap ini terjadi adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan kekerabatan di Minang mulai diperluas melalui sistem bako anak pisang.
3. Tahap ketiga adalah tahap *adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah*, syarak mangato adat mamakai. Pada tahap ini antara adat dan syarak telah terintegrasi.

(http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=berita_baca&id=191)

Nilai dasar adat dan falsafah Minangkabau yang menentukan perilaku orang Minang secara umum itu terdiri dari beberapa aspek yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya setempat antara lain :

1. Pandangan Terhadap Hidup

Tujuan hidup bagi orang Minangkabau adalah untuk berbuat jasa. Kata pusaka orang Minangkabau mengatakan bahwa “hiduik bajaso, mati bapusako”. Jadi orang Minangkabau memberikan arti dan harga yang tinggi terhadap hidup.

2. Pandangan Terhadap Kerja

Sejalan dengan makna hidup bagi orang Minangkabau, yaitu berjasa kepada kerabat dan masyarakatnya, kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai. Kerja merupakan keharusan. Kerjalah yang dapat membuat orang sanggup meninggalkan pusaka bagi anak kemenakannya. Dengan hasil kerja dapat dihindarkan “Hilang rano dek panyakik, hilang bangso indak barameh”(hilang warna karena penyakit, hilang bangsa karena tidak beremas). Artinya harga diri seseorang akan hilang karena miskin, oleh sebab itu bekerja keras salah satu cara untuk menghindarkannya.

3. Pandangan Terhadap Waktu

Bagi orang Minangkabau waktu berharga merupakan pandangan hidup orang Minangkabau. Orang Minangkabau harus memikirkan masa depannya dan apa yang akan ditinggalkannya sesudah mati. Mereka dinasehatkan untuk selalu menggunakan waktu untuk maksud yang bermakna.

4. Pandangan Terhadap Alam

Alam mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternyata dari fatwa adat sendiri yang menyatakan bahwa alam hendaklah dijadikan guru.

5. Pandangan Terhadap Sesama

Dalam hidup bermasyarakat, orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai egaliter atau kebersamaan. Nilai ini menyatakan mereka dengan ungkapan “Duduak samo randah, tagak samo tinggi”.
(<http://palantaminang.wordpress.com/pedoman-adat-minangkabau>)

Menurut Mrazek, Tan Malaka merupakan salahsatu cendekiawan Minangkabau yang menerima visi atau idealisme adat dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Itulah yang menjadi landasan atau dasar struktur pengalamannya. Sikap dan tingkah laku politik serta jalan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh unsur adat dan falsafah hidup Minangkabau (Alfian : 1986 : 57).

Tan Malaka hidup dalam alam Minangkabau yang subur permai dan indah, bergunung-gunung, berlembah, berlaut dan berdanau, kaya dengan flora dan fauna. Pandan gadang tempat kelahirannya merupakan pedesaan yang berlatar perbukitan, dirimbuni pohon kelapa, lengkap dengan sungai dan hamparan sawah. Kehidupan warga kampung tidaklah terlalu sulit karena alam menyediakan semuanya, seperti air gunung siap mengalir sawah dan mengisi empang sepanjang tahun.

Tan Malaka kecil hidup dalam nuansa Minangkabau yang sangat religius sehingga tidaklah lengkap jika tidak membekali dirinya dengan mengaji dan

pencak silat (Susilo, 2008 : 13). Kehidupan religi Tan Malaka seperti halnya mengaji banyak dilakukan di Surau. Surau merupakan salah satu kelengkapan adat sekaligus juga sebagai tempat para pemuda dalam menimba ilmu pengetahuan. Selain itu surau pun terkadang dijadikan tempat untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pencak silat pun menjadi sebuah tradisi dari pemuda masyarakat Minangkabau yaitu sebagai pembentuk kepribadian dan juga kepercayaan diri. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa pada beberapa kesempatan Tan Malaka pun terkadang mempergunakan keahliannya itu seperti banyak diungkapkannya dalam memoirnya *Dari Penjara ke Penjara*.

Meski terkenal kuat dengan kehidupan agamanya yakni Islam, tetapi beberapa ideologi seperti Sosialisme bahkan Komunisme juga berkembang di alam Minangkabau. Hal tersebut tentu saja mengindikasikan bahwa kehidupan adat yang berbalut agama justru berbaur dan bersinergi dengan nilai-nilai Sosialisme. Pada perkembangannya, Tan Malaka pun tidaklah terlepas dari nilai Adat, agama, dan juga sistem sosial lainnya yang berkembang di Minangkabau seperti sosialisme-komunisme.

Munculnya gerakan radikal di Minangkabau berpangkal dari sekolah menengah agama di Padang panjang (Sumatera Thawalib dan Diniyah), Padang (Adabiyah dan Islamic College), dan Bukittinggi (Sumatera Thawalib Parabek), dan sekolah sekuler Kweekschool di Fort de Kock tempat dimana Tan Malaka pernah belajar. Penyebab utama timbulnya pergerakan modern kaum muda di Minangkabau adalah dibangunnya sekolah guru di Bukittinggi sebagai akibat dari

politik Etis Belanda pada awal abad ke- 20. Penyebab lainnya adalah kembalinya para pelajar Minangkabau berpendidikan Kairo dan Makkah yang mendorong berdirinya pendidikan agama secara swadaya dan berakibat tumbuhnya pemikiran baru dikalangan generasi muda Islam. Para pelajar alumni Kairo dan Mekkah seperti Syekh Ahmad Wahab, Syekh Ahmad Chatib, Haji Datuk Batuah, Ijas Jacob merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap modernisasi pemikiran Islam di Minangkabau sehingga tidak heran mereka sering dikatakan sebagai Sekuler karena lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Kemal Attaturk.

Dalam pembentukan karakteristik individu Minangkabau selain didasarkan pada sistem nilai budaya yang ada, juga dapat dipengaruhi oleh sistem sosio-kultural yang berkembang dalam masyarakat. Adat Matrilineal salah satu contoh hal yang juga berperan dalam pembentukan kepribadian terutama individu laki-laki Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau seorang laki- laki dituntut untuk dapat mandiri serta bekerja keras untuk dapat berguna bagi keluarganya.

Selain itu, menurut Rudolf Mrazek yang dikutip Alfian (1986 : 155), Struktur pengalaman Tan Malaka adalah tipe masyarakat Minangkabau yang menganggap bahwa konflik merupakan sebuah esensi dalam mencapai dan mempertahankan perpaduan/ integrasi masyarakat. Jadi dalam kaitannya dengan dialektika adalah masyarakat yang selalu menemukan keserasian dalam kontradiksi. Selain itu, dalam perspektif keluwesan budaya adalah mempertahankan nilai-nilai budaya asli tetapi unsur-unsur positif dari luar juga bisa diterima dan

dimasukan kedalamnya. Dalam hal ini kaitan antara Islam dan Adat dapat dilihat dari perspektif ini.

Merantau merupakan bagian dari tradisi Minangkabau. Kedudukan perantau begitu mulia dalam masyarakat. Pergi merantau, menurut visi falsafah Minangkabau dapat membuka mata untuk mengenal dunia luar yang luas, di mana mereka akan mendapatkan hal-hal baru yang nanti akan dibawanya pulang. Pada waktu yang sama, karena berada diluar alam Minangkabau si perantau akan mampu melihat diri dan peranannya secara lebih jelas dalam konteks kepulangannya nanti. Jadi merantau, bukanlah semata mencari uang atau harta, melainkan juga menuntut ilmu atau mengaji (Alfian, 1986 : 156).

Rantau pertama yang dialami Tan Malaka ialah ketika dia meninggalkan desa tempat lahirnya pergi menuntut ilmu ke “Sekolah Raja” di Bukit Tinggi. Walaupun masih berada di alam Minangkabau, tapi alam asalnya adalah Nagari Pandan Gadang. Sewaktu dia tamat belajar di Bukit Tinggi, ia diberi gelar Datuk Tan Malaka oleh kaum atau sukunya, sebagai kepala adat mereka. Ini berkait erat dengan ilmu yang diperolehnya di rantau. Tidak lama sesudah itu, dia pergi lagi melanjutkan studinya ke negeri Belanda, perantauan yang amat jauh bagi anak muda yang baru berumur 16 tahun. Ruang lingkup alamnya lambat laun berubah dari Nagari Pandan Gadang yang kecil meluas menjadi Minangkabau dan kemudian Indonesia. Modal ini dikembangkan Tan Malaka untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia. Siklus ketiga adalah ketika ia kembali ke Indonesia dari 20 tahun pembuangannya sebagai tahanan politik. Fase ini memberikan kematangan dan kedewasaan

baginya dalam berfikir serta memberikan warna dalam perjalanan Revolusi Indonesia.

Visi adat dan falsafah Minangkabau dari merantau untuk mengontraskan atau membandingkan dunia rantaunya dengan realitas alam asalnya, sehingga dapat melihat mana yang baik dan yang buruk dari keduanya. Hal ini mengundang orang berpikir kritis dan dialektis. Oleh karena itu kontradiksi atau konflik dianggap wajar, terutama karena suasana tersebut akan selalu dapat diintegrasikan atau diselesaikan secara memuaskan atau harmonis melalui proses pemilihan mana yang baik dan buruk dengan akal, yaitu kemampuan berpikir secara rasional. Dengan demikian, visi itu mendorong orang untuk berpikir secara kritis, dinamis atau dialektis. Cara berpikir demikian dengan sendirinya menolak dogmatisme atau parokhialisme. Karena menolak dogmatisme, maka dengan sendirinya menghendaki kebebasan berpikir (Alfian, 1986 : 158).

Dari hal diatas, tidaklah heran walau Tan Malaka banyak mempelajari pengetahuan Barat seperti Sosialisme, Marxisme, tetapi pada dasarnya visi serta cara berfikirnya tidak terlepas dari adat dan falsafah hidup Minangkabau yang dinilainya masih tetap mempertahankan nilai- nilai asli Indonesia (Rambe, 2003 : 92). Dalam perantauan, mental Tan Malaka berhasil melepaskan diri dari keterikatan terhadap salah satu dari berbagai corak nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bercorak lain, berbobot dan orisinal. Ini karena mempunyai idealisme untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia baru, menghargai kebebasan berpikir dan memiliki sikap kritis yang tajam serta mempunyai kepercayaan

kepada diri sendiri yang kuat sehingga mendorong untuk memiliki keberanian mengembangkan pemikiran sendiri.

2. Aspek Pendidikan

Tan Malaka lahir pada akhir abad ke-19, pada saat politik etis Belanda mulai berlaku di Indonesia. Dengan adanya kebijakan politik ini maka terbukalah kesempatan yang makin luas di kalangan pribumi untuk memperoleh pendidikan modern ala Belanda. Pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan atas tenaga-tenaga terdidik untuk birokrasi. Dari sinilah munculnya beberapa intelektual muda yang bersentuhan dengan pemikiran Barat, termasuk tentang nasionalisme. Mungkin setiap masyarakat dalam pertemuannya dengan dunia luar, seperti Barat akan terpaksa membuka dirinya buat menerima kemungkinan lahirnya orang-orang yang berani berfikir dinamis dan kritis sebagai akibat langsung dari pertemuan kedua kebudayaan itu (Alfian 1986 : 164).

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tan Malaka mulai masuk sekolah desa di Suliki sampai kelas dua. Kemudian ia pindah ke Koto VII Tanjung Ampalu mengikuti ayahnya yang pindah bekerja kesana. Terakhir ia pindah ke Sariak Alahan dan menamatkan sekolah Gubernur kelas lima. Setelah menamatkan sekolah Gubernur, Tan Malaka melanjutkan ke Sekolah Raja atau Kweekschool di Fort de Kock, Bukittinggi. Masa studi di Kweekschool Fort de Kock dapat dikatakan sebagai rantau pertama dari Tan Malaka. Disekolah ini Tan Malaka banyak terbuka pemikirannya terhadap cara berpikir Barat.

Pada tahun 1913, Tan Malaka pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Rijks Kweekschool, Harleem. Masa studi Tan Malaka di sekolah ini bisa disebut sebagai awal perkenalannya pada dunia luar selain Indonesia. Berhasilnya Tan Malaka menempuh studi di Rijkweekschool tidak terlepas dari peran G.H Horensma yang berhasil meyakinkan Direktur Van Der Ley bahwa Tan Malaka adalah murid yang pandai.

Disekolah ini Tan Malaka mampu untuk mengatasi masalah pelajaran walaupun terkadang terkendala oleh bahasa. Selain itu, Tan Malaka juga dikenal sebagai siswa yang mudah bergaul dengan guru ataupun dengan siswa lainnya. Dia aktif dalam klub sepakbola dan juga klub orkestra di sekolah.

Selama masa studi di Belanda Tan Malaka juga mulai berkenalan dengan karya-karya penulis- penulis Eropa seperti Nietzsche, Th. C. Arlyle, Karl Marx, Engels, Karl Kautsky yang membuatnya berada dalam semangat dan paham revolusioner. Perkenalannya dengan bacaan-bacaan itu mempunyai dampak yang tidak kecil dalam diri Tan Malaka, terutama dalam cara berfikirnya.

Dalam beberapa kesempatan ataupun dalam tulisannya, Tan Malaka banyak sekali mempergunakan referensi atau rujukan dari karya- karya yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh dalam tulisannya yaitu Madilog :

Madilog lahir dari sintesis pertentangan pemikiran diantara dua kubu aliran filsafat, yaitu Hegel dan Marx- Engels. Hegel dengan filsafat dialektika (Tesis- Antitesis- Sintesis) dengan kebenaran yang menyeluruh hanya dapat tercapai melalui perkembangan dinamis, dari taraf gerakan yang paling rendah sampai paling tinggi (Hidayat dalam mengenang sang legenda : 2010 : 61).

Madilog merupakan sebuah panduan cara berfikir baru, sebuah warisan dari pusaka intelektual barat Marxis-Leninis yang dinilai rasional. Cara berfikir

ini nantinya diharapkan akan menggantikan cara berfikir ketimuran khususnya Indonesia yang dianggapnya masih dikuasai oleh budaya Mistik dan Idealistik (Rambe, 2003 : 90).

Selain itu, Madilog adalah representasi logis dan filosofis pemikiran Tan Malaka dan merefleksikan ke-Indonesiaan. Dalam melihat fenomena yang terjadi terhadap bangsa Indonesia, menurutnya tidak hanya merunut pada kultur penyebabnya melainkan sekaligus menunjuk bagaimana bisa keluar dari penjajahan.

Pengaruh Pendidikan dalam pemikiran Tan Malaka tentunya memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi pemikiran serta garis politiknya. Beberapa karya yang dihasilkannya merupakan representasi dari hasil perjumpaannya dengan dunia pendidikan Barat. Tan Malaka menuangkan gagasan-gagasannya kedalam sekitar 27 buku, brosur dan juga ratusan artikel. Karya-karya Tan Malaka meliputi bidang kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Karya-karya Tan Malaka itu antara lain, Naar de Republiek, Massa Aksi, Madilog, Semangat Muda dll. Dari tulisan-tulisan itulah kita dapat mengenal dan menyelami gagasan-gagasan Tan Malaka yang selalu berlandaskan pada cara berfikir ilmiah, mengutamakan ke Indonesiaan, konsekuen, dan juga konsisten.

Penerimaannya terhadap pemikiran Barat bukan berarti menyerahkan segala sesuatu pada hukum Barat tetapi lebih sebagai upaya untuk mempelajari nilai-nilai budaya Barat. Karena untuk dapat mengalahkan musuh tentulah harus di pahami kekuatan dan kekurangan dari musuh tersebut.

3. Aspek Realitas

Selain aspek yang telah disebutkan diatas, aspek lain yang tak kalah penting dalam upaya memahami latar belakang pemikiran Tan Malaka adalah Aspek Realitas. Aspek Realitas dapat dikatakan sebagai kondisi ataupun situasi yang secara langsung ataupun tidak di alami oleh Tan Malaka. Aspek realitas memegang peran yang sangat besar dalam pemikiran Tan Malaka karena merupakan representasi dari pengamatan serta penghayatannya yang dalam tentang masyarakat. Dalam memahami aspek realitas ini penulis mengambil beberapa realitas sosial yang secara langsung ikut mempengaruhi jalan pemikirannya, yaitu kehidupan keluarga Van der Mij, kehidupan keluarga Koopmans, dan juga kehidupan para pekerja pribumi di Senembah Mij Deli.

Selama menempuh masa studinya di Belanda, Tan Malaka pernah tinggal di beberapa keluarga yang berbeda secara sosial. Keluarga pertama yang menjadi tempatnya bermukim setelah ia keluar dari asrama adalah keluarga Van der Mij. Keluarga Van der Mij merupakan keluarga buruh yang dapat dikatakan Proletar yang miskin yang untuk membayarkan biaya dokter pada saat Tan Malaka jatuh sakit pun bahkan tidak mampu, sehingga hanya dokter pembantu orang miskin yang mampu didatangkan secara percuma yang dapat membantunya dengan memberikan obat puyer murah saja pada waktu itu.

Nyonya rumah Van der Mij adalah seorang buruh yang penuh dengan rasa kemanusiaan, sedangkan tuan Van der Mij pada dulunya bekerja sebagai buruh pada sebuah bengkel besi di Harleem. Sudah lama Van der Mij sakit paru-paru dan dirawat di rumah sakit bahkan menurut Tan Malaka hanya tinggal menunggu

ajal saja (Malaka, 2007: 28). Selama sakit itulah Van der Mij tidak lagi mendapatkan gaji, pensiunan ataupun sokongan dana, praktis ia hanya bergantung pada istrinya saja dan juga anaknya yang bekerja sebagai juru tulis rendahan.

Selain bekerja sebagai buruh, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya nyonya Van der Mij menyewakan kamarnya kepada Tan Malaka dan juga Herman Wouters seorang pengungsi Belgia. Tetapi bayaran yang didapat dari biaya sewa itu menurut Tan Malaka tidaklah berarti, bahkan makanan yang diberikan kepadanya saja sudah melebihi dari yang dibayarkan. Dengan hasil pendapatan yang kecil tersebut, nyonya Van der Mij setiap bulan harus mengongkosi biaya rumah sakit suaminya. Itulah gambaran kemelaratan dan kemiskinan yang dilihat oleh Tan Malaka ketika ia tinggal di keluarga miskin Van der Mij. Tetapi satu hal yang sangat ia kagumi adalah bahwa dengan semua kemelaratan itu nyonya Van der Mij selalu sabar menghadapi semuanya.

Pada waktu tinggal di keluarga Van der Mij, bukan hanya realitas kemiskinan keluarga itu saja yang ia lihat, tetapi ia juga melihat bahwa realitas dunia juga sedang berubah. Hal tersebut tidak terlepas dari diskusi-diskusi yang dilakukannya bersama Van der Mij muda dan juga Herman Wouters teman satu pondokan. Van der Mij muda sangat bersimpati kepada serikat (Inggris, Perancis, Belgia) dan juga seorang pembaca *De Telegraf*, sebuah surat kabar anti Jerman. Herman Wouters adalah seorang pembaca *Het Volk*, sebuah surat kabar Partai Sosial Demokrat Nederland. Selama tinggal di keluarga Mij, Tan Malaka seringkali terlibat dalam percakapan dan juga diskusi-diskusi tentang anti-imperialisme, anti-kapitalisme dll.

Pada tahun 1917, atas bantuan dari salahsatu Studiefonds di Belanda, Tan Malaka pindah ke Bussum. Kepindahannya itu dikarenakan penyakit Pleuritusnya tak kunjung sembuh, sehingga Tan Malaka untuk sementara waktu harus tinggal ditempat yang dinilai cukup sehat untuk menyembuhkan penyakitnya. Selama di Bussum, Tan Malaka tinggal pada keluarga Koopmans.

Nyonya Koopmans dipandang oleh Tan Malaka sebagai orang yang memakai kedok agama untuk mendapatkan kedudukan dalam Gereja. Nyonya Koopmans sangat fanatik sekali terhadap mazhab yang dipercayainya, sehingga terkadang mengecilkan arti mazhab-mazhab Kristen lainnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia pun mengecilkan Islam yang dianggapnya tidak beres. Hal tersebut menjadikan Tan Malaka tidak menaruh simpati pada nyonya Koopmans ini. Tuan Koopmans merupakan seorang tuan rumah yang diam dan penyabar. Ia adalah seorang guru sekolah yang selalu memprotes guru kepala yang dipandangnya sebagai orang yang cuma mondar-mandir saja disekolah. Menurut Koopmans para guru bisa mengatur sekolah secara gotong royong tanpa harus diawasi oleh seorang guru kepala.

Bussum merupakan sebuah kota kecil penuh dengan villa-villa besar. Selama tinggal dikeluarga Koopmans, kesehatan Tan Malaka mulai membaik berkat pengobatan seorang dokter terkenal yaitu Klinge Dorenboos. Selain itu membaiknya kondisi kesehatannya juga lebih dikarenakan lingkungan yang sehat dimana udara selalu segar, cahaya matahari selalu masuk ke beranda, makanan yang disajikan penuh mengandung zat dan terpelihara (Malaka, 2007 : 33).

Kehidupan Tan Malaka pada saat tinggal di Bussum bersama keluarga Koopmans memang dapat dikatakan setengah mewah dan bisa membawanya pada pola hidup Borjuis. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang dialaminya selama tinggal bersama keluarga Van der Mij yang miskin, dimana jangankan makanan yang mengandung zat dan terpelihara atau untuk ongkos dokter, untuk mendapatkan lingkungan yang sehat pun tidak ia dapatkan. Dalam analisisnya, Tan Malaka menganggap terdapat jurang yang sangat dalam antara borjuis dan juga proletar. Sikap kritis tersebut telah mengantarnya mempelajari buku-buku terutama yang berkaitan dengan perjuangan kelas. Itulah salahsatu realitas yang turut serta dalam membentuk persepsi dalam kognisi Tan Malaka.

Pada tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai pengawas sekolah untuk anak-anak kuli pada Maskapai Senembah Deli. Pekerjaan sebagai pengawas sekolah ia dapatkan dari Dr. Herr Jansen pada waktu ia masih menjadi pelajar di Rijkweeschool, Belanda. Dr. Jansen merupakan seorang tuan besar pada salahsatu bagian Senembah Mij yaitu tepatnya di Tanjung Morawa. Dr. Jansen lah yang memberinya pekerjaan dan mengongkosi perjalanan pulang Tan Malaka dari Negeri Belanda.

Menurut Tan Malaka, Deli merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, tanah emas dan surga bagi kaum kapitalis, tetapi neraka bagi kaum proletar. Deli pada saat itu adalah kota besar dengan penduduk ditaksir mencapai sekitar 2 juta jiwa, namun sekitar 60% dari masyarakatnya merupakan kuli kontrak perkebunan, pertambangan, dan pengangkutan. Menurut Tan Malaka,

sekitar 60% masyarakat tersebut merupakan keluarga proletaris tulen dan Deli merupakan daerah proletaria yang sesungguhnya. Lebih jauh Tan Malaka menggambarkan tentang realitas yang dilihatnya di Deli sebagai berikut :

Deli selama saya disana (Desember 1919-1921), sekarang pun masih menimbulkan suatu kenang-kenangan yang sedih memilukan. Disana berlaku pertentangan yang tajam antara modal dan tenaga kerja serta penjajah dan terjajah. Kekayaan bumi iklimnya Deli menjadi alat adanya satu golongan kaum modal penjajah yang paling kaya pada satu kutub. Di kutub yang lain berada satu golongan bangsa dan pekerja Indonesia yang pling terhisap, tertindas dan terhina : kuli kontrak (Malaka, 2007 : 53).

Tan Malaka menyaksikan sendiri bahwa terdapat ketimpangan dalam sosial yang terjadi didalam perkebunan. Dalam Pandangannya tampak penghisapan besar-besaran kaum buruh oleh tuan tanah (Zara, 2007 : 23). Kondisi tersebut digambarkan oleh Tan Malaka dalam bukunya dari Penjara ke Penjara :

Pertentangan tajam antara bangsa kulit putih, goblog, sombong, ceroboh, penjajah dengan bangsa berwarna yang berpengalaman membanting tulang, tetapi tertipu, terhisap, tertindas, dengan perantaraan dua tiga bangsa Indonesia sendiri sebagai buruh pandai, *skilled labour*, inilah yang mengeruhkan suasana Deli (Malaka, 2007 : 59).

Selain mengurus Pendidikan untuk anak-anak kuli kontrak di Senembah Mij, Tan Malaka juga aktif menampung keluh kesah para kuli kontrak. Para kuli kontrak itu pada umumnya buta huruf dan terjerat berbagai peraturan kontrak yang mereka tidak bisa pahami. Tan Malaka menganggap bahwa para kuli itu terbelenggu oleh kekolotan, kebodohan, kegelapan sekaligus juga hawa nafsu jahat seperti permainan judi sebagai implikasi dari adanya diskriminasi budaya dan juga kurangnya penghidupan yang layak.

Menurut Tan Malaka para kuli kontrak itu rata-rata mendapatkan gaji sebesar f 0.40,-/ hari tau sekitar f 20,- atau f 30,-/ bulan. Hal tersebut tentu saja menurutnya jauh sekali dari layak jika dibandingkan dengan waktu kerja yang sangat panjang dalam satu hari yakni dari sekitar jam 4 pagi sampai pukul 7 atau 8 malam barulah para kuli kontrak itu bisa istirahat. Kekurangan dalam segala hal menimbulkan nafsu dari beberapa orang untuk mengadu nasib lewat main judi. Banyak diantaranya yang kalah main judi terpaksa harus meneken kontrak lagi untuk membayar pinjaman hutangnya ketika kalah bermain judi. Hal tersebut memang sengaja dibuat seperti itu oleh para tuan tanah di Senembah Mij untuk dapat terus mengikat para kuli kontrak dengan aturan dan perjanjian kerja yang tidak mereka pahami (Malaka, 2007 : 57).

Penindasan dan diskriminasi seringkali diterima oleh para kuli kontrak, sehingga tidak heran jika satu makian atau celaan saja sudah cukup bagi para kuli untuk menghunus golok dari pinggangnya dan menyerang tuan besar atau tuan kecil. Pertentangan itu menjadi sangat nyata sekali dalam sebuah proses peradilan antara kuli kontrak dengan orang Belanda. Seorang Belanda yang tidak sengaja atau hanya untuk mempertahankan diri dari serangn para kuli, biasanya lepas dari semua dakwaan atau hukuman 3 bulan atau bisa juga dengan membayar sejumlah uang jaminan/denda. Sedangkan jika seorang kuli kontrak pembunuh bisanya tidak akan pernah lepas dari hukuman pancung ataupun hukuman seberat-beratnya karena berani menyerang kulit putih.

Pada dasarnya pertentangan antara Tan Malaka dengan para tuan besar pada kebun di Senembah Mij adalah berkisar pada permasalahan, 1. Warna kulit,

2. Pendidikan anak-anak kuli, 3. Tulis-menulis dalam surat kabar Deli, 4. Perhubungan Tan Malaka dengan para kuli kontrak.

Sekali lagi jelas terlihat ketidaksenangan Tan Malaka dalam melihat ketimpangan dan kesenjangan yang dilihat dan dialaminya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tan Malaka sangat terpengaruh oleh kondisi atau realitas yang ada disekitarnya, dan hal tersebut tentu mempunyai dampak terutama terhadap pembentukan Struktur Kognisi Tan Malaka, dimana unsur-unsur kognisi (sikap, ide, harapan) ini berbenturan dan menimbulkan relevan dan tidak relevan dalam struktur kognisi, yang kemudian menimbulkan impuls (reaksi nyata), dalam arti membalas rangsang-rangsang dari luar. Kekuatan struktur kognisi ini telah membuat sebuah perubahan, dimana unsur kognisi ini mempengaruhi dan membentuk perilaku, dalam arti perbuatan yang didasarkan kepada unsur kognisi psikologis seseorang dalam kehidupan sosial, dimana dalam perilaku sosialnya didasarkan kepada unsur-unsur kognisi yang membentuk perilaku.

Jadi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Realitas Sosial sangat mempengaruhi pemikiran dan garis politik Tan Malaka. Hal tersebut dapat tercermin dari sikapnya yang konsisten untuk membela rakyat yang tertindas dan terjajah, sehingga ia pun akhirnya terjerumus dalam kancah Revolusi Indonesia sampai akhir hidupnya.

C. Analisis Tan Malaka Tentang Masyarakat Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Revolusi Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Revolusi Indonesia, terlebih dahulu Tan Malaka menganalisa fenomena maupun kejadian yang terjadi didalam masyarakat Indonesia. Analisa tersebut tidaklah didasarkan atas kajian dari sebuah literatur atau bacaan saja tetapi juga didasarkan atas realitas yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut tentunya dipandang sebagai cara analisa seorang Marxis yang menekankan sebuah kesimpulan itu tidak didasarkan pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ditemukan atau diciptakan begitu saja oleh seorang pemikir, tetapi didasarkan pada penjelasan hubungan sosial yang nyata yang timbul dari perkembangan-perkembangan yang sedang berlangsung di masyarakat.

Didalam “ *The Communist Manifesto* ” Marx mengulas perkembangan sejarah Manusia di dunia ini pada awalnya merupakan masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan dan mencukupi kebutuhannya melalui alam, dan mengambil hanya secukupnya saja disesuaikan dengan kebutuhan, serta tidak pernah ada yang namanya penumpukan modal. Masyarakat pada tahap ini dinamakan oleh Marx sebagai masyarakat Komunis Purba. Masyarakat Komunis Purba ini pada tahap perkembangannya mengalami perubahan menjadi masyarakat perbudakan sebagai awal dari terjadinya zaman feodal. Pada tahap feodal, kelas-kelas dalam masyarakat berkembang menjadi banyak dan rumit seperti kelas bangsawan, pemilik tanah, pekerja, budak, dll. Kemudian pada fase selanjutnya, masyarakat feodal ini kan di singkirkan oleh masyarakat Borjuis dan pekerja melalui sebuah perantaraan revolusi (Rambe, 2003 : 204).

Dalam fase kapitalis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka industri pun tumbuh dan sistem produksi pun beralih menjadi Struktur Kelas. Pada periode ini Marx mengatakan bahwa akan terdapat tiga kelas yang hidup dalam masyarakat, tetapi nanti pada perkembangannya akan menyusut menjadi dua kelas, dan pada akhirnya kelas itu akan hilang seiring dengan adanya perjuangan kelas.

Menurut Tan Malaka, sikap marxistis yang benar dalam mendapatkan sebuah kesimpulan untuk menentukan sikap dan tindakan dalam Revolusi Indonesia adalah menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan Dialektika. Kedua, memakai tafsiran Materialisme dalam melihat perubahan sejarah dan bukan dengan tafsiran Idealisme. Ketiga, semangat pemeriksaan serta penyelesaian soal masyarakat serta sikap dan tindakan yang didasarkan kepada kesimpulan itu haruslah semangat kemajuan yang revolusioner.

Selanjutnya menurut Tan Malaka untuk menguji mengenai benar atau salah sebuah kesimpulan, sikap dan tindakan maka haruslah didasarkan pada golongan yang berkepentingan itu :

1. Dalam soal Revolusi Nasional, apakah bangsa yang terjajah berjuang untuk membela kemerdekaannya itu sesungguhnya menjadi bangsa yang merdeka dalam segala lapangan hidupnya terhadap bangsa lain, atau kembali dijajah dengan cara lama.
2. Dalam hal Revolusi Burjuis, apakah klas Burjuis yang tertekan oleh klas feodal dalam masyarakat tadi dan berjuang untuk mendirikan masyarakat burjuis sesungguhnya mendapatkan kekuasaan bagi penindas-pemeras kaum proletar dan untuk membela kaum burjuis.
3. Dalam hal Revolusi Proletar, apakah klas proletar sanggup melepaskan dirinya dari pemeras tindakan burjuis (Feodalis) dan mendirikan masyarakat yang Sosialistik yang menuju ke arah komunisme (Malaka, 2007 : 91).

Tafsiran tersebut penting sekali untuk diteliti, karena hal itu jua berkaitan dengan masalah revolusi di Indonesia. Tafsiran tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap pilihan taktik dan strategi dalam Revolusi.

Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia tidaklah terlepas dari proses pertentangan yang berlangsung semenjak dulu. Proses pertentangan dalam kebangsaan, sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia awal merupakan masyarakat Komunis asli. Dimana segala kebutuhan dapat terpenuhi oleh alam tempat dimana mereka tinggal. Dalam masyarakat seperti ini belumlah dikenal pembagian kerja, tetapi masih dikerjakan bersama secara komunal dan hasilnya pun untuk kepentingan bersama.

Dari sisi religi pun belum dikenal konsep Tuhan dan ibadah yang lebih jelas. Sistem kehidupan ini berjalan secara dinamis dimana perkembangannya unsur-unsur baru akan berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Fase masyarakat komunisme purba ini dikatakan oleh Tan Malaka belum menampakan adanya sistem produksi perkembangan, keadaan alam nya pun masih hutan- hutan dan masyarakatnya banyak yang menjadi nelayan serta pelaut yang mengembara ke banyak tempat di dunia.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan mulai menyebarnya agama Hindu maka perkembangan sejarah masyarakat Indonesia pun beralih ke Fase Feodalisme. Unsur utama ajaran Hindu terletak pada pembagian kelas atau yang biasa dikenal dengan kasta.dalam strukur masyarakat Hindu dikenal dengan 4 kasta yakni Brahmana, ksatria, Waisya, dan sudra. Bersamaan dengan itu fase feodalisme dalam perkembangan masyarakat Indonesia pun ditandai dengan

berdirinya negara Majapahit dan Sriwijaya. Dalam masyarakat feodal seperti ini sudah terdapat pertentangan dalam masyarakat, karena kelompok atau kelas dalam masyarakat sudah semakin beragam, begitu pun kepentingan dan kebutuhan dalam masyarakat pun semakin kompleks sehingga menuntut adanya suatu tatanan kehidupan yang jelas, seperti pembagian kerja, pembagian hasil atau upah dll.

Dimasa masyarakat Feodal ini negara tidak luput lagi daripada sifat menindas oleh satu golongan terhadap golongan yang lain. Hanya saja yang menjadi masyarakat Murba pada saat Sriwijaya dan Majapahit itu ialah bangsa Indonesia sendiri, sedang kelas atasnya pada sektor perdagangan pemerintahan dan urusan keagamaan terdapat bangsa Hindu asli atau campuran dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Tan Malaka sejak saat itulah berturut-turut Hindu atau Indo Hindu serta Arab atau Indo Arab yang mengendalikan perekonomian terutama perdagangan Indonesia dengan dunia luar (Malaka, 2007 : 93).

Dengan datangnya Imperialisme dagang Belanda pada permulaan abad 17, mengakibatkan hancurnya perekonomian feodal Hindu dan Arab di Indonesia. Produksi tingkat manufacture kemudian digantikan dengan sistem produksi yang Kapitalisme awal (*Pre-Capitalism*) yang sedikit maju dari sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya perdagangan Ekspor- Import Indonesia di Monopoli oleh Belanda (Rambe, 2003 : 211). Kemudian dalam praktek perekonomiannya, Belanda menerapkan pemerasan terhadap bangsa Indonesia. Sejak saat itulah mulai muncul tanam paksa dan kerja Rodi untuk keperluan Kolonial yang menjadikan Indonesia sebagai lahan pemerasan. Dalam Massa Aksi Tan Malaka

pun mempertegas hal tersebut, bahwa proses kapitalis tersebut telah lama melenyapkan saudagar-saudagar Indonesia dan perusahaan yang kecil. Hal tersebut ia lukiskan seperti berikut :

Beberapa juta sekarang hidup “ Pagi makan petang tidak” tidak bertanah dan tidak beralat, tidang berpengharapan di belakang hari. Kekuasaan atas tanah, pabrik, alat-alat pengangkutan dan badan perdagangan kini semuanya dipusatkan ditangan beberapa sindikat [.....] pemimpin sindikat itu besar-besar itu terserah ke tangan beberapa orang kapitalis. Pertentangan sosial antara kapitalis dan buruh Indonesia berhubungan dengan beberapa hal lain lebih tajam daripada yang kelihatan oleh mata. Keuntungan besar dari gula, minyak, karet, kopi, teh, dan lain-lain. Sebagian besar mengalir ke Eropa, ke kantong bangsa Belanda, dan sebagian kecil ada juga kembali ke Indonesia ... (Malaka, 2010 : 93).

Uraian di atas pada dasarnya adalah mempertegas akan akibat yang ditimbulkan oleh keberadaan Kapitalis Belanda. Hal itulah nantinya yang akan menjadi dasar dari akar pertentangan antara Kapitalis- Imperialis Belanda dengan kaum buruh dan masyarakat Indonesia. Adanya kesenjangan dalam beberapa aspek kehidupan sosial akhirnya menumbuhkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan sebagai akibat dari praktek penjajahan dan penindasan itu. Kondisi itulah yang dijadikan sebuah pertimbangan oleh Tan Malaka dalam menentukan kesimpulan akan bentuk dan tindakan dalam Revolusi Indonesia.

Menurut Tan Malaka, dengan runtuhnya kekuasaan feodal di Indonesia, secara otomatis jatuh juga alat penindasnya yaitu negara feodal beserta perangkat-perangkatnya. Maka dengan demikian jatuhlah kaum feodal tersebut dalam lembah pengangguran. Para bangsawan dan kaum ningrat yang kehilangan kekuasaan itu, oleh Belanda mereka dipakai sebagai kaki tangan penjajah Belanda dalam mengelola pemerintah jajahan. Mereka di jadikan anggota *B.B Ambteneran* (pamong praja) yang mengerjakan pekerjaan administratif pemerintah jajahan

Belanda sebagai Bupati, wedana, Residen, Lurah, Tentara, dll (Rambe, 2003 : 212). Dalam beberapa tulisannya, Tan Malaka menyebut para bangsawan yang menjadi kaki tangan penjajah dengan *Inlander*. Kondisi tersebut diatas menurutnya turut berperan dalam melanggengkan praktek-prakrek Feodalisme di Indonesia. Jadi menurutnya, perjuangan dalam Revolusi Indonesia bukan hanya perkara mengusir Imperialisme- penjajah dari tanah air tetapi juga mengikis sisa-sisa feodalisme.

D. Pemikiran Tan Malaka Tentang Kemerdekaan Indonesia

Pada umumnya pemikiran- pemikiran dan perjuangan Tan Malaka terpusat pada satu tujuan untuk kemerdekaan bangsanya dan sekaligus merombaknya secara total dan drastis dalam bidang, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Alfian, 1986 : 166).

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka menganggap bahwa dengan jalan Revolusilah Indonesia dapat melepaskan diri dari lingkungan kelas dan penjajahan (Malaka, 2010 : 33). Tan Malaka menganggap bahwa Revolusi Indonesia mempunyai dua tombak yaitu, mengusir Kapitalisme- Imperialisme dan mengikis sisa-sisa Feodalisme. Revolusi yang dilakukan tersebut menurutnya akan mendatangkan perubahan yang berarti dan menyeluruh dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu tentu saja akan melahirkan masyarakat baru di Indonesia, masyarakat baru tersebut merupakan masyarakat indonesia yang merdeka dan sosialis.

Dengan kata lain, Tan Malaka menyimpulkan bahwa Revolusi Indonesia adalah perjuangan untuk, 1). Menghilangkan Imperialime asing atas Indonesia, 2).

Mengikis sisa-sisa budaya feodalisme yang telah mengungkung Indonesia jauh sebelum bangsa Belanda datang yang dianggapnya sebagai penyebab terjadinya Imperialisme di Indonesia, dalam hal ini Revolusi ini lebih bersifat kearah sosial yang mencakup perubahan dalam mentalitas dan cara berfikir.

Analisis Tan Malaka mengenai Revolusi Indonesia dalam hal ini tidak berhenti pada sistem Imperialisme dan kapitalisme ekonomi yang telah menghimpit Indonesia tetapi juga pada sistem feodalime yang telah menjajah bangsa ini dalam hal mentalitas. Feodalisme dianggap telah melahirkan dan menyuburkan adanya budaya budak, mental kuli, mental bangsa yang takut berfikir, percaya takhyul serta apatis terhadap perubahan. Oleh karena itu tidak cukup hanya Revolusi fisik Nasional saja tetapi harus juga dibarengi juga dengan revolusi cara berfikir dan mengartikan realitas secara baru sebagaimana hal ini diungkapkan dan dibahas dalam karyanya Madilog.

Apabila kita telaah lebih jauh bahwa dalam melaksanakan kedua hal dalam revolusi Indonesia itu haruslah berjalan secara dinamis. Karena menurut Tan Malaka apabila mentalitas serta cara berfikir masyarakat yang masih tertinggal, tidak mungkin untuk mengadakan Revolusi Nasional, begitupun tanpa adanya Revolusi Nasional maka bangsa Indonesia akan tetap terjajah dan terus menerus berada dalam kungkungan kebodohan. Jadi dalam pelaksanaannya revolusi ini harus berjalan seimbang karena seperti dikatakan Tan Malaka menenyahkan imperialisme Belanda mungkin lebih mudah ketimbang menenyahkan Feodalisme yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.

Pilar utama dalam membangun kehidupan sebuah bangsa yang mandiri dan sejahtera adalah penguatan mental warganya. Faktor mentalitas sangatlah penting, karena berfungsi bukan hanya sebagai modal dasar saja tetapi juga sebagai pengendali jalannya kehidupan bernegara agar tetap berada pada jalur yang benar. Jika mentalitas tidak terbangun maka jangan pernah berharap jalannya kehidupan bangsa ini bisa bertahan (Nasruddin Anshory ch, 2008 : Vii)

Mengenai pemikirannya tentang Revolusi sosial (mencakup Revolusi berfikir dan mentalitas) seperti dijelaskan di atas tidak terlepas dari analisa Tan Malaka yang menganggap bahwa Feodalisme telah sedemikian rupa mengakar pada sistem budaya Indonesia, sehingga hal itu dianggapnya menghambat dalam proses Revolusi Indonesia terutama karena mentalitas *Inlanders*. Pada saat itu banyak para bangsawan dan ningrat sisa-sisa feodalisme yang telah hancur oleh Kolonialisme Belanda memilih untuk bekerjasama dengan penjajah untuk mendapat sejumlah kompensasi yang menguntungkan dan tentunya sudah pasti bahwa korbannya adalah rakyat.

Didalam kaitannya dengan revolusi cara berfikir dan revolusi mentalitas sebagai bagian dari budaya Feodalisme, Tan Malaka mengajukan sebuah revolusi cara berfikir yang ia tuangkan dalam beberapa karyanya seperti Materialisme – Dialektika- Logika (MADILOG) ataupun dalam Pandangan Hidup. Tan Malaka menganggap nilai-nilai berfikir secara Madilog sebenarnya sudah ada sejak dulu yang dikatakannya sebagai bagian dari budaya asli Indonesia. Pada tahap ini Tan Malaka menganggap bahwa dalam budaya Indonesia asli terdapat cara berfikir dinamis dan rasional yang lebih menekankan *matter of fact* atau didasarkan atas

sebuah bukti. Tetapi pada fase selanjutnya Tan Malaka melihat bahwa budaya asli Indonesia itu mulai tergusur dengan kedatangan Hindu-Budha di Indonesia. Menurutnya dengan kedatangan Hindu-Budha maka nilai budaya Indonesia asli mulai hilang dan digantikan oleh budaya Hindu-Budha yang dianggapnya sebagai budaya pasif dan penuh dengan Logika Mistika, sehingga menurutnya hilanglah fakta, hilanglah bukti, hilanglah cara berfikir rasional dan mulailah kegelapan dan kemunduran budaya terjadi di Indonesia.

Menurutnya penyebab mundurnya dari kebudayaan bangsa Indonesia adalah tidak terlepas dari kedatangan Hindu dan Imperialisme Belanda. Dalam beberapa kesempatan dalam Madilog terlihat Tan Malaka sangat membenci budaya Hindu-Jawa dalam segala wujudnya yang dipandang sebagai penanggung jawab terhadap keterbelakangan yang dialami bangsa Indonesia.

Untuk itu Tan Malaka menganggap bahwa madilog merupakan merupakan sebuah konsep revolusi cara berfikir dari Barat yang dipandang lebih rasional untuk melawan budaya berfikir ketimuran yang dianggapnya kuno dan penuh mistik. Dengan memahami madilog maka masa penuh kegelapan tidak akan terjadi lagi pada bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Revolusi Indonesia penulis mengemukakan 3 konsep yang dapat dijadikan acuan dalam memahami konteks Revolusi Indonesia menurut Tan Malaka. Konsep tersebut antara lain :

1. Massa Aksi

Berkaitan dengan Revolusi Nasional dalam konteks Revolusi Indonesia hingga terjadinya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan

akumulasi dari berbagai perubahan politik, sosial, ekonomi, maka Tan Malaka mengurainya dari kebijakan ataupun tindakan yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda hingga wajah Revolusi itu dapat mejelma seperti dia lihat.

Menurut Tan Malaka Imperialisme lahir sebagai akibat dari semakin tumbuhnya kapitalisme. Namun pada perkembangannya tidaklah merata. Sebagai contoh, Imperialisme Inggris tentunya sangat berbeda dengan Imperialisme Belanda yang disebutnya sebagai Kapitalis muda karena sebagian besar feodalismenya sudah terdesak oleh bojuasi, namun hal tersebut belumlah bisa untuk dapat disamakan dengan negara industri seperti Inggris dan Amerika. Begitupun jika dibandingkan dengan Imperialisme Portugis ataupun Spanyol, Imperialisme Belanda adalah berbeda.

Adapun bila dilihat dari cara penindasannya dalam politik, lebih lanjut Tan Malaka menjelaskannya dengan gamblang dalam bukunya Massa Aksi seperti berikut :

1. Imperialisme Biadab, yaitu menghancurkan segala kekuasaan politik pribumi dan mendirikan negara jajahan yang dijalankan secara sewenang- wenang (dalam penjajahannya melakukan perampokan secara terang- terangan, seperti Spanyol di Filipina).
2. Imperialisme Autokratis, yaitu hampir sama dengan Imperialisme biadab diatas, hanya berbeda dalam cara penjajahannya yaitu dengan cara Monopoli perdagangan seperti yang dilakukan Belanda di Indonesia.

3. Imperialisme setengah Liberal, yaitu memberikan kekuasaan terbatas pada pribumi untuk berkuasa (dalam penjajahannya melakukan perdagangan setengah Monopoli seperti yang dilakukan Inggris di India)
4. Imperialisme Liberal, yaitu memberikan keleluasaan sepenuhnya pada kepada tuan- tuan tanah yang besar serta kepada borjuasi pribumi yang mulai muncul seperti yang dilakukan Amerika di Filipina (Malaka, 2010 : 4-5).

Penyebab dari terjadinya perbedaan dalam praktek-praktek Imperialisme adalah dikarenakan oleh berbedanya tingkatan Kapitalisme di masing-masing negara. Sebagai contoh, Belanda pada saat datang ke Indonesia belumlah berada dalam tahap Industrialisasi, negara tersebut masih berada pada taraf pertanian dan perdagangan. Ketiadaan bahan baku di negara tersebut menurut Tan Malaka membuat Belanda masih tetapi tinggal sebagai negeri tani dan saudagar, seandainya saja negeri Belanda itu merupakan negeri Industri seperti Inggris ataupun Amerika, mungkin praktek penjajahan yang dilakukan di Indonesia tidak akan separah itu (Rambe, 2003 : 215).

Menurut Tan Malaka dengan ketiadaan bahan baku tersebut maka tidak heran bahwa hal tersebut berpengaruh juga terhadap praktek prakteknya di Indonesia, hampir semua hasil bumi indonesia diangkut utuk kemudian dijual dipasaran Eropa. Hal senada diungkapkan juga oleh Soekarno dalam bukunya *Mentjapai Indonesia Merdeka* mengatakan bahwa Ekspor hasil bumi Indonesia dengan mengambil angka tahun pada 1924-1930 merupakan yang terbesar di

dunia jika dibandingkan dengan negara jajahan lainnya. Soekarno melukiskannya dengan :

Semua adalah pendjelmaan penanaman modal asing di sini; semua itu adalah menggambarkan bagaimana hebatnja raksasa itu memperusahakan Indonesia menjadi *Exploitatiegebiednja* surplus kapital. Ribuan, tidak, miliunan kekajaan jang saban tahun meninggalkan Indonesia mengajakan moder- kapitalisme didunia barat (Soekarno, 1984 : 14) .

Hal tersebut sengatlah berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Filipina dan India, Amerika tidak menjadikan negeri jajahan sebagai lahan untuk di eksploitasi tetapi justru menjadikannya sebagai lahan atau tempat dalam rangka menjual hasil produksi dalam negerinya. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik negeri Amerika yang memang mempunyai hasil bumi dan bahan baku. Kondisi tersebut memberikan peluang untuk terciptanya borjuasi di negara jajahan. Jadi dalam hal beberapa hal, cara- cara imperialisme yang dilakukan oleh masing- masing negara Imperialis akan berbeda yang ditentukan oleh tingkat kapitalisasi di negaranya.

Kebijakan politik Belanda terhadap Indonesia, menjadikan sulitnya Indonesia berkembang secara ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kapitalisme yang di Indonesia bukanlah kapitalisme yang dihasilkan atas kekuatan kapital bumiputera tetapi seluruh kapital yang ada di Indonesia merupakan kapital yang dihasilkan atas tindakan Belanda di Indonesia.

Begitu pun kapital yang mengalir di Indonesia, kalau dikaji lebih lanjut bukanlah milik Belanda sepenuhnya, karena seperti diketahui Belanda bukanlah negara yang kuat dalam hal kapital. Beberapa bagian usaha di Indonesia banyak juga yang kapitalnya dimiliki oleh Inggris dan juga Amerika. Hal tersebut tidak

terlepas dari lemahnya kedudukan Imperialisme Belanda dalam militer sehingga tidak mampu sendirian membela Indonesia dengan senjata, maka sejak tahun 1905 kaum imperialis Belanda terpaksa menjalankan politik pintu-terbuka (*opendeur politiek*), artinya Indonesia dibuka menjadi lapangan eksploitasi kaum kapitalis dari segala negara kapitalis, terutama negara Inggris dan Amerika. Dengan menjalankan politik pintu-terbuka kaum imperialis Belanda memperhitungkan dua keuntungan: 1) berupa kenaikan hasil pajak yang didapat dari perusahaan-perusahaan imperialis; 2) berupa pertahanan bersama antara negara-negara imperialis untuk melindungi kepentingan-kepentingannya di Indonesia, dan bersamaan dengan itu kaum Imperialis Belanda juga dapat menjalankan politik keseimbangan antara negara-negara imperialis agar Indonesia tidak dicaplok oleh negara imperialis yang lain

Sehingga hasil bumi Indonesia tidak hanya mengalir ke Belanda saja tetapi dalam beberapa bagian ada juga yang mengalir ke Inggris. Tan Malaka mencontohkannya pada tahun 1924, tingkat Ekspor Indonesia ke Inggris adalah 42, 55 % dari seluru total Ekspor Indonesia, sedangkan yang mengalir ke Belanda hanya sebesar 19,7 % saja (Malaka, 2010 : 72).

Menurut Tan Malaka dalam bukunya Massa Aksi menyatakan bahwa Imperialisme Belanda di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan yang luas. Para petani banyak yang kehilangan tanahnya, akibat pengambilan secara paksa atau perubahan lahan bagi usaha bagi kapitalisme Belanda (Rambe, 2003 : 219). Selain itu bencana kelaparan juga terjadi di beberapa tempat, begitupun dalam bidang pendidikan yang hanya dapat diakses atau dinikmati oleh segelintir

golongan bumi putera saja, karena pada dasarnya diadakannya pendidikan sebagai warisan dari politik Etis merupakan upaya Belanda untuk mendapatkan tenaga kerja murah di tanah jajahan untuk melanggengkan praktek penjajahannya.

Tan Malaka menganggap bahwa Politik imperialis Belanda sama sekali bukan untuk memajukan industri Indonesia, tetapi untuk memajukan industri negeri imperialis sendiri. Kaum imperialis menentang sekeras-kerasnya perkembangan industri yang luas di Indonesia, dan inilah sebabnya Indonesia tidak berkembang menjadi industri maju walaupun secara raelitas, Indonesia mempunyai syarat untuk menjadi negara Industri yang maju.

Dengan adanya pertentangan antara rakyat Indonesia dan Imperialis Belanda yang semakin tajam, maka harapan dan kemauan untuk merdeka berlangsung bersama dengan penderitaan itu. Pertentangan yang makin tajam antara yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai menyebabkan pihak yang berkuasa melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Dalam kesimpulannya tentang beberapa masalah politik, ekonomi, sosial yang ditimbulkan oleh Imperialisme Belanda adalah :

- 1). Kekayaan dan kekuasaan sudah tertumpuk dalam gengagaman orang kapitalis Belanda.
- 2). Rakyat Indonesia semuanya semakin lama semakin melarat, tertindas dan juga terkungkung.
- 3). Pemerintah Belanda Makin lama makin Revolusioner.
4. Bangsa Indonesia semakin hari semakin bertambah ke-revolusionerannya dan tiada mengenal kata damai (Malaka, 2010 : 111)

Dalam analisisnya mengenai upaya kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka menganggap bahwa sebuah upaya untuk Revolusi Indonesia tidak mungkin dilakukan dengan cara kekerasan fisik seperti *Putch* ataupun melalui jalan Parlemerter. Menurutnya dengan ketiadaannya factor ekonomi (Borjuasi), sosial ataupun intelektual untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, sehingga usaha-usaha mendapatkan kemerdekaan melalui jalan parlemerter dianggap sebagai sesuatu yang kurang efektif karena Indonesia tidak mempunyai pra-syarat yang bisa dijadikan sebagai *bergainning position* dengan Imperialisme Belanda.

Upaya dengan jalan Palemerter merupakan suatu usaha yang sia-sia karena, masyarakat Indonesia belum mengenal Demokrasi, dan karena seperti disebutkan diatas bahwa tidak adanya Borjuasi yang kuat, semua upaya untuk mengarah kepada Parlemerter adalah dapat dikatakan tidak akan berhasil dan tidak mungkin. Menurutya hanya kelas buruh Indonesia yang dapat memegang kekuasaan diktator-proletariat yang menguasai kehidupan ekonomi melalui organisasi buruh yang kuat. Dalam kesimpulannya mengenai upaya perjuangan dengan jalan Parlemen adalah:

1. Bangsa Indonesia yang 55.000.000; pada dasarnya tidak mempunyai hak suara, karena semua unsur yang berhubungan dengan parlemen baik kebijakan ataupun pemilihan anggotanya dilakukan oleh Belanda.
2. Kapital besar yang memerintah melalui perantara kaum birokrat yang tak berjantung dan militeris yang picik.
3. Dewan rakyat itu seekor lintah yang melekat di punggung rakyat (Malaka, 2010 : 106).

Untuk itu Tan Malaka hanya melihat bahwa dengan *Massa Actie* secara teraturlah revolusi nasional Indonesia dapat direbut. Hanya dengan satu Massa Aksi yang tersusun yang akan memperoleh kemenangan di satu negeri yang berindustri tutur Tan Malaka. Sebuah revolusi dalam perspektif Tan Malaka haruslah memperhatikan 3 pokok yaitu 1). Program, 2). Organisasi dan 3). Strategi/Taktik. Diluar dari semua itu Tan Malaka menolaknya. Putsch atau kudeta dianggap Tan Malaka sebagai khayalan bodoh karena tidak memperhitungkan sebuah kondisi objektif. Latar Belakang munculnya gagasan Tan Malaka tentang Massa Aksi tidak terlepas dari gagalnya Pemberontakan PKI 1926. Karyanya Massa Aksi awalnya ditujukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi pada perjalanannya Massa Aksi dapat dilihat sebagai jawaban dari gagalnya Pemberontakan 1926 yang ditentang oleh Tan Malaka juga sebagai pedoman dan acuan bagi tokoh pergerakan pada saat itu seperti Soekarno, Hatta, Sukarni dll

Putsch itu satu aksi segerombolan kecil yang bergerak diam- diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak. Gerombolan itu biasanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri dengan tidak memperdulikan perasaan dan kesanggupan masaa. Ia sekonyong- konyong keluar dari guanya dengan tidak memperhitungkan terlebih dahulu, apakah saat untuk bermasa aksi itu sudah matang atau belum. Dia menyangka bahwa semua lamunannya tentang massa benar sama sekali. Dia lupa atau tidak mau tahu bahwa massa hanya dengan berturut-turut dapat ditarik ke aksi yang keras (secara modern!) dan pada waktu sengsara serta penuh reaksi yang membabi buta. Tukang- tukang putsch lupa bahwa saat Revolusi yakni apabila massa aksi berubah menjadi pemberontakan bersenjata tak dapat di tentukan berbulan- bulan lebih dulu, sebagaimana yang biasa yang bisa dilakukan oleh tukang tenung. Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. Bila tukang-tukang putsch pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka sendiri keluar tiba- tiba (seperti Her Kapp tukang kup yang Masyur itu), masa tidak akan memberikan

pertolongan kepada mereka karena massa hanya berjuang untuk kebutuhan yang terdekat dan menurut jalan kepentingan ekonomi (Malaka, 2010 : 120).

Dari analisisnya di atas, Tan Malaka beranggapan bahwa Putsch yang dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang dan terorganisir bukan membawa pada sebuah kemenangan tetapi justru malah sebaliknya akan menjadikan rakyat menjadi korban dari upaya yang dilakukan itu. Tan Malaka juga melihat tidaklah tepat apabila melaksanakan putsch seperti di Jawa, yang nyatanya merupakan daerah Konsentrasi Kapital karena hal itu akan dengan cepat tercium oleh spion-spion dan tentara Belanda.

Menurutnya aksi yang paling tepat dalam menentang Imperialisme dan Kapitalisme Belanda adalah dengan cara pemogokan, pemboikotan ataupun dengan cara Demonstrasi atau berbaris secara besar-besaran. Hal itu tentu saja akan berdampak sangat besar karena apabila aksi itu terus menerus dilakukan maka perekonomian imperialis akan goncang dan juga tentunya hal ini sangat berpengaruh juga terhadap Kapital Imperialis.

Kelebihan Massa aksi dibandingkan dengan yang lain menurut Tan Malaka adalah, perjuangan bisa terjaga, kedua, adalah untuk memperlihatkan kekuatan terhadap musuh. Dengan Massa aksi dimungkinkan sedikit terdapatnya korban dalam sebuah aksi- aksi yang dilakukan walaupun terkadang pengorbanan itu diperlukan dalam sebuah revolusi. Untuk dapat menjamin bahwa massa aksi itu bisa berhasil sesuai dengan tujuan yang digariskan maka diperlukan adanya seorang pemimpin yang Revolusioner yang mempunyai kecakapan dan ketangkasan dalam memimpin serta mempunyai pengetahuan praktis tentang

politik, ekonomi, dari negeri serta psikologi dari. Selain itu seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat memanfaatkan situasi yang terjadi dalam masyarakat untuk diambil menjadi sebuah keuntungan.

Pada tahun 1927 Tan Malaka bersama, Subakat dan Djamaludin Tamim mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) di Bangkok (Djojoprajitno, 2010 : 117). PARI didirikan sebagai bentuk implementasi dari ide serta gagasan Tan Malaka, selain itu PARI dibentuk sebagai akibat dari kekecewaannya terhadap Pemberontakan PKI tahun 1926 dimana ia menyatakan penolakannya terhadap aksi tersebut karena menurutnya tidak didasarkan atas Massa Aksi. Penolakan Tan Malaka akan Pemberontakan tahun 1926 tersebut didasarkan karena :

1. Tahun 1926, tidak ada krisis (artinya situasi Revolusioner belum ada)
2. PKI, belum cukup berdisiplin (hal mana di akui oleh Lembaga Sejarah PKI).
3. Seluruh rakyat dibawah pimpinan PKI (serikat rakyat sudah dibubarkan).
4. Tuntutan dan semboyan yang nyata terasa bagi rakyat tidak dipikirkan.
5. Imperialisme internasional bersatu menentang Komunisme (Djojoprajitno, 2010 : 103- 104).

Jadi cukuplah jelas bahwa kondisi saat itu tidaklah memungkinkan untuk diadakannya suatu aksi pemberontakan dikarenakan PKI sendiri belum cukup kuat dan belum mempunyai akar-basis masa yang kuat sehingga sangat sulit sekali untuk upaya dengan cara PKI tersebut. Terbukti bahwa dengan sekejap saja pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh pemerintah Imperialis Belanda. Sebagai dampak dari akibat pemberontakan tersebut maka peraturan pemerintah Belanda terhadap organisasi yang ada di Indonesia semakin diperketat bahkan PKI pada saat itu dapat dikatakan mati. Kondisi itulah yang mendorong Tan Malaka untuk mendirikan PARI sebagai kelanjutan dari cita-cita Revolusinya.

Penolakan Tan Malaka terhadap Pemberontakan 1926, membawanya pada konflik dengan beberapa tokoh PKI seperti Muso, Alimin, dll. Dalam laporannya, Lembaga sejarah PKI menganggap bahwa Tan Malaka mempunyai peran dalam kegagalan pemberontakan tersebut disamping karena hal teknis lainnya. Tan Malaka dianggap membuat kondisi organisasi dalam keadaan sulit dengan melakukan perpecahan mendirikan PARI (Djojoprajitno, 2010 : 95). Hal tersebut tentulah sangat bertentangan, karena PARI didirikan pada tahun 1927 setelah Revolusi gagal itu dilakukan. Tapi terlepas dari semua itu, penolakan Tan Malaka terhadap pemberontakan PKI 1926 atas dasar keyakinan prinsip perjuangan membuat ia akhirnya ditolak bahkan dimusuhi, dan dicap sebagai Trotskys atau Revisonis oleh Partai yang pernah ia besarkan. Hal tersebut sangat berdampak sekali terhadap perkembangan perjuangan Tan Malaka ke depan. Tan Malaka tidak hanya dicari dan dimusuhi oleh Imperialis Belanda tetapi sekaligus juga dimusuhi oleh kawan sendiri di dalam PKI.

2. Pan Islamisme

Selain pemikirannya tentang Massa Aksi dalam upaya perjuangan Revolusi Indonesia, ada hal lain yang menarik dari pemikirannya yaitu tentang Pan Islamisme. Pada kongres Komunis Internasional (Comintern) ke-4 tahun 1922 di Moskow, Tan Malaka menganjurkan terdapatnya kerjasama dengan kaum muslim dunia dalam melawan Kapitalisme.

Gagasannya tentang pan-Islamisme tidak terlepas dari pengalamannya dalam organisasi Sarekat Islam yang mana merupakan salahsatu organisasi

pergerakan yang didominasi oleh orang Islam. Dalam pidatonya di kongres

Komintern IV tersebut Tan Malaka mengatakan :

Pan-Islamism is a long story. First of all I will speak about our experiences in the East Indies where we have cooperated with the Islamists. We have in Java a very large organisation with many very poor peasants, the Sarekat Islam (Islamic League). Between 1912 and 1916 this organisation had one million members, perhaps as many as three or four million. It was a very large popular movement, which arose spontaneously and was very revolutionary. ([http://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1922-communism and Pan Islamism .htm](http://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1922-communism-and-Pan-Islamism.htm)).

Pan Islamisme punya sejarah panjang, pertama saya ingin bercerita tentang pengalaman kami bekerjasama dengan kelompok muslim di Hindia. Di Jawa kami memiliki sebuah organisasi buruh- buruh miskin, Sarekat Islam, yang pada 1912-1916 memiliki satu juta anggota, mungkin juga tiga atau empat juta. Ini sebuah gerakan Revolusioner yang amat besar dan muncul secara spontan.

Dari pidato yang diucapkannya tersebut Tan Malaka secara tegas menginginkan terjadinya sebuah kerjasama yang baik dengan kaum muslim di dunia, khususnya SI dengan SI di Indonesia. Hal tersebut tentunya dengan dasar pertimbangan bahwa pada saat itu SI merupakan organisasi yang revolusioner yang terlihat dari tingginya dukungan massa. Oleh karena itu Tan Malaka menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara perjuangan kaum Islam dan dengan tuntutan pembebasan yang diusung komunis. Menurut Prasetyo yang dikutip Najip HS Parino, pidato itu secara tegas menyebutkan, bahwa Pan Islamisme berarti perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan Islam dilihat bukan hanya sebagai agama tetapi negara dan agama. Selain itu Pan Islamisme juga dapat diartikan bersatunya seluruh kekuatan Islam di nusantara melawan Kapitalisme Belanda, pandangan tersebut menjadikan Tan Malaka pada posisi istimewa dimata kaum pergerakan Islam (Najip, 2007 : 6). Upaya kerjasama dari pemikiran Tan Malaka itu mendapat penolakan termasuk oleh Stalin sendiri yang

menganggap bahwa Pan-Islamisme merupakan satu bentuk Kolonialisme (Zulhasri dalam mengenang sang legenda, 2010 : 25). Tetapi hal tersebut dibantah juga oleh Tan Malaka dengan mengatakan bahwa tidak perlu menterjemahkan Pan-Islamisme sebagai urusan Khalidi dunia arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa- bangsa muslim yang tertindas dimana saja (Susilo, 2008 : 78). Selain itu pokok perkara yang ia majukan dalam pidatonya tersebut adalah bagaimana seharusnya sikap Komunis terhadap Nasionalisme di jajahan, yang di Hindustan, Tiongkok umpamanya berupa pemboikotan dan negeri- negeri Arab ataupun Indonesia berupa Pan Islamisme (Malaka, 2007 : 127).

Pandangan mengenai kerjasama antara Komunis dengan Pan Islamisme memang tidak bisa dipisahkan dari kondisi dan situasi di Indonesia saat itu, Sarekat Islam pada saat itu dibawah H.O.S Tjokroaminoto dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan yang cukup mempunyai pengaruh di Indonesia. Jadi cukuplah beralasan ketika Tan Malaka mengusulkan hal tersebut. Selain itu gagasan ini juga tidak terlepas dari hasil kongres Comintern II yang salahsatu hasilnya adalah berjuang melawan Pan Islamisme (Seri Buku Tempo, 2010 : 76). Hal tersebut menurut Tan Malaka justru semakin mempersulit situasi Perjuangan di Indonesia karena dengan hal itu justru dimanfaatkan oleh Belanda untuk mempengaruhi golongan Islam agar memusuhi komunis dan puncaknya pada tahun 1921 terjadilah disiplin partai dalam Syarekat Islam dan hal itu sekaligus memutus mata rantai kerjasama antara golongan komunis dengan golongan Islam.

3. Merdeka 100%

Selain pemikiran Tan Malaka yang terangkum dalam Massa Aksi dan Pan-Islamisme, terdapat satu konsep perjuangan yang dikemukakan oleh Tan Malaka terutama dalam masa mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu konsep MERDEKA 100%. Konsep merdeka 100% ini merupakan sebuah konsep dalam perjuangan, bahwa dalam semua hal haruslah dilandasi oleh sebuah persamaan atas dasar merdeka 100%.

Revolusi Nasional 17 Agustus 1945 menurut Tan Malaka merupakan puncak perlawanan massa rakyat sampai berhasil menumbangkan kekuasaan imperialisme fasis Jepang. Karena itu pada dasarnya Revolusi 17 Agustus 1945 memiliki watak yang anti-imperialisme dan sekaligus juga anti-feodalisme yang selama ini menjadi basis imperialisme. Namun kenyataannya, setelah adanya Proklamasi 17 Agustus 1945 Rakyat Indonesia masih harus berjuang melawan agresi imperialisme Belanda yang didukung Inggris dan Amerika. Selain itu, Indonesia harus menandatangani beberapa perjanjian seperti Linggarjati, Renville, dan juga terakhir KMB yang sangat merugikan kepentingan Rakyat Indonesia karena secara ekonomi menjamin kepentingan imperialisme di Indonesia dan secara politik menempatkan Indonesia persemakmuran di bawah kekuasaan politik Belanda.

Melihat situasi Indonesia yang seperti diatas, maka Tan Malaka menyimpulkan bahwa Revolusi 17 Agustus 1945 telah gagal menunaikan tugas sejarahnya untuk menghancurkan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme serta kapitalisme birokrasi. Adapun salahsatu faktor yang menyebabkan kurang

maksimalnya perjuangan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 menurut Tan Malaka adalah sikap politik pemerintah dibawah Perdana Menteri Sjahrir yang cenderung kooperatif dan memilih cara diplomasi untuk menegakan kemerdekaan daripada cara perjuangan yang lebih radikal. Cara- cara dengan berdiplomasi itu menurut Tan Malaka seharusnya dilandasi oleh adanya suatu persamaan kedudukan atau dengan kata lain adalah berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.

Sebagai contoh ketidaksepakatan Tan Malaka dengan garis politik Sjahrir adalah, Tan Malaka menolak dan mengecam adanya perundingan Renville dan juga Linggarjati. Menurutnya Perjanjian Linggarjati dan juga Renville keduanya telah mengurangi kemerdekaan Indonesia dalam hal urusan luar negeri, kemiliteran, keuangan, perekonomian, dan sangat menguntungkan Belanda (Malaka, 2008 : 224). Selain itu menurutnya bahwa perjanjian tersebut telah melanggar arti Proklamasi 17 Agustus dan terang-terangan telah membawa Indonesia ke dalam bentuk penjajahan yang baru. Prinsip perjuangan atas dasar merdeka 100% itu mendapatkan simpati dari beberapa kelompok, terbukti pada 4 Januari 1946 bersama 141 organisasi perjuangan Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto sebagai organ baru dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Jenderal Sodikman pun memberikan sambutannya dan mendukung Program Minimum Perjuangan yang dihasilkan pada kongres ini.

Saudara- saudara jang siap sedia membela Kemedekaan 100%! Saja sangat gembira atas dibentuknya Volksfront jang berani bertanggung djawab itoe. Kedoedoekan dan kewadjiban tentara jang saja pimpin adalah

mempertahankan kemerdekaan 100%. Tentara timboel tenggelam dengan negara.

Pemimpin- pemimpin negara boleh berganti, kabinet bole berganti 3 kali seboelan, tetapi tentara tetap berdjoeng teroes sampai 100% kemerdekaan tertjapai.

Tentara berjoeang teroes dengan rakjat membela tanah air.

Lebih baik di atoom sama sekali daripada merdeka ta 100% (Poeze, 2009 : 216).

Minimum Program yang dikemukakan Tan Malaka pada Kongres Persatuan Perjuangan pertama mencakup Tujuh inti pokok yaitu, berunding atas pengakuan 100%, melucuti tentara Jepang, menyita aset perkebunan milik Belanda, menasionalisasi industri asing di Indonesia, dll (Triyana dalam Tan Malaka, Bapak Republik yang dilupakan, 2010: 171).

Disamping banyak yang mendukung pada Minimum Program perjuangan Tan Malaka, tetapi pada akhirnya hal tersebut membawanya pada pertentangan dengan Sutan Sjahrir, karena dapat dikatakan bahwa program persatuan perjuangan tersebut merupakan kritik oposisi terhadap pemerintah terutama pada Sjahrir. Kabinet Sjahrir kemudian jatuh, tetapi atas campur tangan Soekarno, Sjahrir pun kemudian kembali menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 17 Maret 1946 Tan Malaka pun ditangkap atas dasar tuduhan mengacau keamanan dan bertindak menggelisahkan. Selang 4 bulan ke depan beberapa pemimpin Persatuan Perjuangan pun ditangkap atas dasar tuduhan Subversif dari kudeta 3 Juli 1946. Dengan ditangkapnya Tan Malaka dan beberapa pucuk pimpinannya, maka Persatuan Perjuangan sebagai organ dalam gagasan revolusionernya pun akhirnya dapat dikatakan mati.

Menurut Ben Anderson, pembungkaman Tan Malaka telah mengakhiri setiap harapan yang pernah ada bahwa Indonesia akan memilih jalur perjuangan

daripada diplomasi. Tan Malaka menawarkan sebuah sebuah jalan Merdeka 100%, tapi hal itu mustahil terjadi dalam gelombang revolusi yang dahsyat saat itu. Dan hanya ia sendiri yang tahu betul apa yang harus dilakukannya untuk mewujudkan cita- cita itu (Triyana dalam Tan Malaka Bapak Republik yang dilupakan, 2010 : 174).

Sebagi kesimpulan dalam konteks Revolusi Indonesia, Tan Malaka membuat sebuah analisa berdasarkan Tafsiran Materilisme- Dialektik sebagai berikut :

1. Alam dan masyarakat Indonesia, dengan perantaraan bangsa Barat sebelum Proklamasi kemerdekaan sudah membentuk satu sistem masyarakat kapitalis dan masyarakat jajahan ditinjau dari cara- cara produksi, kehidupan sosial, dan juga politik (Thesis)
2. Dalam kamdungan Imperialisme Belanda itu, timbulah faham yang bertentangan dengan faham masyarakat kapitalis dan jajahan tersebut. Sehingga timbulah keinginan untuk mendirikan masyarakat baru yang didasarkan atas teknik barat tetapi bersendikan pada tolong menolong dan berdasarkan kemerdekaan juga persamaan diantara manusia dan manusia serta bangsa didunia (Anti- Thesis)
3. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan saat dimana rakyat dan pemuda untuk mulai melaksanakan faham pembentukan masyarakat baru di bumi Indonesia (Tan Malala, 2010 : 55- 56).

E. Pemikiran Tan Malaka tentang Organisasi, Program, Taktik/ Strategi Dalam Revolusi Indonesia.

Pemikiran Tan Malaka dalam konteks Revolusi Indonesia dapat lebih jauh kita lihat dalam tulisannya seperti dalam *Naar de Republiek*, *Massa Aksi* dan *Semangat Muda*. Untuk dapat memahami garis besar pemikiran Tan Malaka berkaitan dengan Organisasi, Program dan Strategi-taktik dalam Revolusi Indonesia maka penulis akan membaginya dalam 2 fase perjuangan yaitu sebelum kemerdekaan yang akan diwakili oleh PKI dan PARI, dan juga sesudah kemerdekaan yang diwakili oleh Persatuan Perjuangan dan Partai Murba.

Menurut Tan Malaka, jika mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan *Massa Aksi* yang tersusun untuk mencapai Kemerdekaan Nasional, maka haruslah ada satu partai yang revolusioner (Malaka, 2010 : 126). Pendapat Tan Malaka tentang Partai Revolusioner dapat dipahami bahwa pada saat itu belum ada di Indonesia satu partai yang bisa dikatakan menjadi alat perjuangan dalam Revolusi Indonesia. Partai Revolusioner tersebut menurutnya adalah gabungan orang-orang yang bersamaan pandangan dan pemikiran dalam revolusi.

Alasan perlu adanya suatu partai Revolusioner tidak dapat dilepaskan dari prinsip perjuangan Tan Malaka yaitu *Massa Aksi*. Menurutnya jika suatu partai Revolusioner berhasil mengorganisir kaum buruh untuk melakukan pemogokan dan pemboikotan dan juga yang bukan buruh dapat berdemonstrasi menuntut hak ekonomi dan politiknya, maka niscaya bahwa akibat dari aksi tersebut akan

mendatangkan keuntungan yang sangat besar ketimbang aksi-aksi yang dilakukan secara radikal atau dengan kekerasan.

Adapun berhubungan dengan tugas dari Partai Revolusioner itu adalah menjadi pelopor pergerakan dan segala tindakan Revolusi. Selain itu partai Revolusioner juga harus berjuang di barisan terdepan dalam setiap upaya-upaya perjuangan Revolusi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut partai dibantu oleh organisasi-organisasi yang bernaung dan berafiliasi terhadap partai. Organisasi partai ini dimaksudkan sebagai organ atau bagian dari partai yang bisa dipergunakan sebagai wadah untuk menyusun, latihan, dan pendidikan bagi calon-calon anggota dan pemimpin partai.

Menurut Tan Malaka untuk menjamin bahwa Revolusi itu dapat berhasil maka diperlukan beberapa faktor :

1. Objektif, yaitu tingkatan produksi dan kemelaratan massa.
2. Subjektif, yaitu kesediaan bangsa Indonesia mesti berupa satu partai yang sempurna dan keadaan revolusioner yang mendukung.
3. Untuk mencapainya, partai harus mempunyai disiplin (Malaka, 2010 : 134).

Dalam kaitannya dengan sebuah partai revolusioner dalam Revolusi Indonesia Tan Malaka menganggap bahwa pada saat itu belum ada satupun partai politik di Indonesia yang begitu jauh telah mengumumkan programnya. Bahkan dapat dikatakan belum ada partai atau perkumpulan yang benar-benar berjuang dalam upaya Revolusi kemerdekaan Indonesia.

Dalam analisisnya mengenai gerakan kemerdekaan di Indonesia, dikatakannya bahwa kegagalan sebuah gerakan di Indonesia bukan hanya terletak pada kelemahan pemimpin pergerakan saja, tetapi lebih dikarenakan oleh ketiadaan kapital yang besar dari bumiputera, seandainya saja terdapat kapital yang besar maka organisasi gerakan itu akan sampai pada sebuah gerakan kemerdekaan dengan program organisasi dan taktik yang cocok.

Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dipandang oleh Tan Malaka sebagai satu partai yang malas diantara partai borjuis lainnya. Selain itu Budi Utomo juga dipandang sebagai organisasi yang terkesan Jawa- sentris yang hanya terpaku pada persoalan penghidupan di Jawa saja tanpa memperhatikan persoalan rakyat di tanah lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari cara pandang dan berfikir mereka yang dikatakan oleh Tan Malaka masih terkungkung oleh riwayat perbudakan yang mana masih berpegang pada mitologi dan mistik. selain itu, Budi Utomo dipandang oleh Tan Malaka sebagai organisasi yang tunduk pada kekuasaan imperialis sehingga dapat dikatakan sebagai kolaborator.

Menurut Tan Malaka, Budi Utomo dengan corak kedaerahannya tidak akan membawa pada suatu persatuan dalam kerangka perjuangan nasional, justru malah menimbulkan sebuah permasalahan baru, yang mana dengan sifat kedaerahan itu bisa dijadikan senjata oleh Imperialisme Belanda untuk mengadu diantara organisasi pergerakan.

Selain Budi Utomo Tan Malaka pun memberikan pendapatnya tentang *National Indische Partij*, dalam analisisnya Tan Malaka mengkritik organisasi tersebut dengan mengatakan tidak terdapatnya suatu cita-cita nasional dari

borjuasi yang tergabung dalam NIP tersebut yang dikarenakan oleh perhubungannya dengan orang-orang Indo- Belanda seperti Douwes Dekker yang setengah-setengah dalam kebangsaan Indonesia, sehingga tidak dapat satupun dari program nasional yang dapat diwujudkan.

Dalam pandangannya Tan Malaka masih melihat terdapatnya sebuah ketergantungan dari para pemimpin NIP dalam kerangka perjuangan Indonesia, sehingga dapat dikatakan tidak akan pernah mandiri. Hal tersebut menurutnya mungkin akan lain jika seandainya para pemimpin dalam NIP itu mampu menghubungkan antara perjuangan kebangsaan dengan program proletaris atau dalam harti menarik kaum buruh dalam basis perjuangan.

Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1913 setelah Indische Partij dibubarkan, menurut Tan Malaka pada awalnya tampil dengan suara bergemuruh sebagai penyambung penderitaan rakyat atas dominasi Tionghoa. Organisasi ini menurutnya tidak didasarkan atas massa aksi yang teratur tetapi lebih didasarkan atas manifestasi perasaan tidak senang, dibawah saudagar- saudagar kecil yang menghimpunnya atas dasar agama. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Susilo bahwa gerakan Pertama (SI) yang berbasis pada massa bertitik berat bukan pada Nasionalisme ataupun program politik, melainkan pada agama (Susilo, 2008 : 123).

Kelemahan-kelemahan Sarekat Islam menurut Tan Malaka terletak pada kekurangkapan dari pemimpin SI seperti H.O.S Tjokroaminoto, Abdul Muis, dll dalam memimpin organisasi massa yang teratur sehingga walaupun pada saat itu SI mampu untuk membuat program yang berbasis massa dan terjun dalam politik

kebangsaan hal tersebut menurut Tan Malaka lebih karena pengaruh pergerakan kaum Revolusioner Semarang yang dipimpin Semaun. Selain itu pertentangan dalam tubuh SI pun lebih dikarenakan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin SI.

Hal tersebut diatas justru dipandang lain oleh Taufik Adi Susilo, perihal Sarekat Islam Susilo memandang bahwa meski tidak ada gagasan perjuangan Nasionalis, tak terelakan SI memegang peranan kepercayaan Nasional. SI tidak mempunyai program politik diluar melayani kepentingan kaum Islam dan keorganisasiannya sangat longgar. Meskipun demikian, keanggotaannya berkembang pesat hingga mencapai ratusan ribu orang pada tahun 1916 (Susilo, 2008 : 123).

Selain itu dalam analisisnya mengenai Sarekat Islam bahwa organisasi ini dapat dikatakan mati, ketika terjadinya disiplin di dalam tubuh Sarekat Islam yang intinya adalah tidak memperbolehkan adanya keanggotaan ganda dalam Sarekat Islam. Sebagai konsekuensi dari aturan itu, SI pun akhirnya terpecah, masing masing kemudian masuk dalam SR dan juga PKI. Hal tersebut akan sangat berpengaruh nantinya terhadap pemilihan nama pada PKI. Pemilihan nama Partai buka lagi Sarekat dimaksudkan bahwa sebagai anggota partai berhak untuk menjadi anggota sarekat, hal tersebut jelas sangat berbeda dengan konsep Sarekat. Dengan terjadinya perpecahan itu maka hilang pula harapan Tan Malaka akan konsep Pan-Islamisme yang telah diusungnya selama ini dalam upaya kerjasama antara orang Komunis dengan kaum Islam. Dan hal tersebut dapat dilihat pada perjuangan Tan Malaka pada fase selanjutnya yang cenderung kurang begitu

bersimpati dalam pelibatan unsur tokoh atau Islam sebagai kesatuan umat (bukan ajaran) dalam perjuangan nasional.

Dengan terlebih dahulu menganalisa perihal gerakan kemerdekaan di Indonesia ditinjau dari sisi kelemahan dan kekurangannya dari mulai Budi Utomo sampai Sarekat Islam, akhirnya Tan Malaka menganggap bahwa PKI lah sebagai partai Revolusioner yang bisa diharapkan dalam kerangka perjuangan kemerdekaan dan Revolusi Indonesia. Konteks anggapan tersebut dilihat dari sebelum terjadinya perpecahan dalam tubuh PKI pasca Pemberontakan 1927 yang ditolak oleh Tan Malaka.

1. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Riwayat berdirinya PKI tidak akan bisa dilepaskan dari *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1914 atas prakarsa dari Henk Sneevliet seorang anggota Partai Sosial Demokrat Belanda (SDAP) dan juga pemimpin Serikat Buruh Kereta Api (*Nederlansche Vereeniging van Spoor en Tramsweg Personneel*). Pada tahun 1918 ia keluar dari SDAP dan kemudian bergabung dengan SDP atau Partai Komunis Belanda (*Communistische Partij Holland*).

Penetrasi ide-ide dan ajaran Marxisme di Indonesia dilakukan lewat ISDV dan VSTP tersebut diatas. Ajaran Marxisme itu kemudian menjadi semakin kuat setelah para pemimpin Sarekat Islam dapat dipengaruhi dan ditarik untuk mengikuti garis ajaran Marxis. Hal tersebut diataslah yang nantinya menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam yang berujung pada disiplin partai.

Ditengah Perseteruan internal dalam tubuh SI, pada tanggal 23 Mei 1920 didirikanlah Perserikatan Komunis di India (PKI). Dalam kongres bulan Juni 1924, Perserikatan Komunis di India diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, ini merupakan pertama kalinya di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata "Indonesia". Sebetulnya sejak tahun 1922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama *Indonesische Vereeniging*, atau lebih dikenal dengan nama Perhimpunan Indonesia. Tetapi Perhimpunan Indonesia merupakan gerakan kebangsaan yang berada di Belanda bukan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Partai Komunis Indonesia dapat dikatakan sebagai organisasi Revolusioner yang mampu mengorganisir massa pada saat itu. Tidak mengherankan bahwa setelah PKI berdiri, gelombang perjuangan pun semakin besar dan semakin Revolusioner, pemogokan dan demonstrasi buruh banyak dilakukan. Sebagai salahsatu akibatnya maka pada 3 Maret tahun 1922 Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke Kupang, kemudian pada bulan itu juga dia di *Externering* ke Belanda (Rambe, 2003 : 2007). Dari pembuangan dan pelariannya itu maka munculah karyanya yang terkenal seperti Naar de Repuliek, Massa Aksi, Semangat Muda yang dapat dikatakan sebagai referensi dalam praktek perjuangan di Indonesia.

Dalam Bukunya *Naar de Republiek* (Menuju Republik Indonesia) dijelaskan mengenai sebuah konsep perjuangan yang menurutnya harus mencakup 3 hal yaitu, Organisasi, Program, Strategi-taktik. Dalam buku tersebut Tan Malaka menguraikan gagasannya tentang Organisasi atau Partai yang digambarkannya

dengan PKI. Sedangkan dalam Program PKI dalam upaya Revolusi Indonesia Tan Malaka menjabarkannya (Malaka, 2000 : 23) sebagai berikut :

PROGRAM NASIONAL PKI

A. EKONOMI

1. Menasionalisir pabrik-pabrik dan tambang-tambang seperti tambang arang batu, timah, minyak dan tambang emas.
2. Menasionalisir hutan- hutan dan perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan gula, karet, teh, kopi, kina, kelapa, nila, tapioka.
3. Menasionalisir perusahaan lalulintas dan angkutan.
4. Menasionalisir bank-bank, perusahaan-perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan besar lainnya.
5. Me-Elektrofisir Indonesia dengan membangun industri-industri baru dengan bantuan negara seperti pabrik-pabrik mesin dan tekstil dan galangan pembikinan kapal.
6. Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan batuan kredit yang murah dari negara.
7. Memberikan bantuan hewan dan alat-alat kerja kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun-kebun percobaan negara.
8. Pemandahan penduduk besar-besaran biaya negara dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa.
9. Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah- tanah itu.
10. Menghapuskan sisa-sisa tanah feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani.

B. POLITIK

1. Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan tak terbatas
2. Membentuk Republik Federasi dari pelbagai pulau di Indonesia.
3. Segera memanggil rapat Nasional dan yang mewakili semua rakyat dan agama di Indonesia.
4. Segera memberikan hak politik sepenuhnya kepada penduduk Indonesia baik laki- laki maupun wanita.

C. SOSIAL

1. Gaji minimum, kerja 7 jam dan perbaikan jam kerja dan penghidupan buruh.
2. Perlindungan kerja dengan pengakuan hak mogok diantara buruh
3. Pembagian keuntungan bagi buruh di industri- industri besar.

4. Membentuk Majelis Buruh di Industri besar.
5. Pemisahan gereja dan negara dan mengakui kemerdekaan beragama.
6. Membentuk hak-hak sosial, ekonomi, dan politik kepada semua warga negara baik laki-laki maupun wanita.
7. Menasionalisasi rumah-rumah besar dan membangun rumah-rumah baru dan distribusi rumah- rumah antara buruh negara.

D. PELAJARAN DAN PENDIDIKAN

1. Wajib belajar bagi anak- anak semua warga negara Indonesia dengan cuma-cuma sampai umur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama.
2. Menghapuskan sistem pelajaran sekarang dan menyusun sistem yang langsung berdasarkan atas kepentingan- kepentingan Indonesia yang sudah ada dan yang akan dibangun.
3. Memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah kejuruan, pertanian, dan perdagangan dan memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah bagi pegawai-pegawai tinggi di lapangan teknik dan administrasi.

E. MILITER

1. Menghapuskan tentara imperialis dan mengadakan milisi rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia.
2. Menghapuskan kehidupan di kamp-kamp (tangsi-tangsi) dan semua UU yang merendahkan militer rendahhan mengijinkan bertempat di kampung-kampung dan dirumah-rumah baru yang dibangun untuk mereka, perlakuan lebih baik dan mempertinggi gaji mereka.
3. Memberikan hak sepenuhnya untuk mengadakan organisasi dan rapat kepada militer Indonesia.

F. POLISI

1. Pemisahan pangreh praja, polisi dan justisi.
2. Memberikan hak-hak sepenuhnya kepada tiap-tiap terdakwa untuk melindungi diri menentang hakim di muka pengadilan, dan membebaskan terdakwa dalam waktu 24 jam jika bukti dan saksi-saksi bagi mereka ternyata cukup.
3. Tiap-tiap perkara yang mempunyai dasar hukum, harus diselesaikan dalam waktu lima hari yang sesuai tertib di muka umum.

G. RENCANA AKSI

1. Menuntut 7 jam kerja, gaji minimum dan syarat-syarat kerja dan penghidupan yang lebih baik bagi buruh.

2. Mengakui Sarekat Kerja dan Hak Mogok.
3. Organisasi dan Petani untuk hak- hak ekonomi dan politik.
4. Menghapus *Peenalo sanctie*.
5. Menghapuskan hukum- hukum dan Undang-undang untuk menindas pergerakan politik, seperti hak- hak pemerintah untuk :
 - a. Mengasingkan tiap- tiap orang yang dipandang berbahaya bagi pemerintah.
 - b. Melarang Pemogokan.
 - c. Melarang dan membubahrkan rapat.
 - d. Melarang penyiaran Pers.
 - e. Melarang memberikan pelajaran- pelajaran dan pengakuan sepenuhnya atas kemerdekaan bergerak.
6. Menuntut hak berdemonstrasi, demonstrasi massa di seluruh Indonesia melawan penindasan ekonomi dan politik seperti : pajak pembebasan dengan pengembalian orang buangan politik , massa aksi yang mana harus diperkuat dengan pemogokan umum dan melawan pemerintah.
7. Menuntut hapusnya *Volsraad, Raad Van Indie* dan *Algemeene Secreetaaris* dan pembentukan Majelis Nasional (*National Assembly*) dari mana nanti akan dipilih badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional.

Dari pemaparan tentang Program Nasional PKI pada saat itu, terlihat bahwa Tan Malaka ingin membedakan antara PKI dengan gerakan kebangsaan lainnya melalui sebuah program yang bersendikan atas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya akan sangat percuma jika sebuah pergerakan Revolusioner itu tanpa dibarengi dengan Program Revolusioner. Sebuah gerakan Revolusioner yang tak mempunyai dasar teori dan tujuan yang nyata maka akan menjadi tidak berdaya di hadapan Kapitalis. Hal tersebut dicontohkannya dengan, Budi Utomo, NIP, dan sarekat Islam.

Program Nasional PKI ini menurut Tan Malaka dimaksudkan sebagai program yang akan menjadi dasar yang kuat ketika besok atau lusa kapitalis itu runtuh atau jatuh. Dengan hal itu rakyat Indonesia dapat mempunyai kerangka

acuan dalam perjuangan nasional Indonesia. program ini menurut Tan Malaka di harapkan agar mmbangkitkan dan memusatkan tenaga-tenaga seluruh rakyat untuk bangkit merebut kemerdekaan. Selain itu , jika pada suatu saat nanti mendapat kemerdekaan maka akan dapat juga untuk mempertahankannya.

Menurut Tan Malaka, apabila pada suatu saat nanti program ini dapat dilaksanakan maka kemerdekaan dalam itu akan tampak lebih nyata daripada yang dinamakan merdeka di banyak negara lainnya. Pada fase ini, buruh industri akan memiliki industri besar dan melakukan kekuasaan yang nyata baik dalam ekonomi maupun dalam politik negara. Penindasan dan pemerasan terhadap kaum buruh pun tidak akan terjadi lagi karena hubungan sosial antara buruh dan majikan akan memberikan tempat pada persamaan dan kemedekaan.

Selain itu dengan program ekonomi yang jelas, maka hasilnya akan dapat digunakan untuk membangun industri di Indonesia, seperti pabrik mesin, galangan kapal dll. Selain itu keuntungan ekonomi tersebut bisa juga digunakan untuk membantu keuangan para petani, pedagang kecil dan juga industri kecil. Jadi pada intinya program ini tidak hanya meliputi nasib perburuhan dalam arti yang sempit tetapi juga meliputi rakyat Indonesia secara keseluruhan (Malaka, 2000 : 27- 29).

Dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan Tan Malaka menganjurkan adanya kerjasama antara kaum Proletar dengan yang bukan Proletar. Hal tersebut sangat penting sekali karena terkadang orang yang bukan Proletar memaknai secara sempit akan Revolusi Nasional yakni hanya menginginkan hapusnya Imperialisme saja bukan penghapusan hak milik seperti keinginan kaum Proletar.

Sehingga hal tersebut dipandang mutlak adanya kerjasama antara proletar dan bukan proletar untuk mengantisipasi terjadinya perbudakan nasional baru jika seandainya saja kemerdekaan nasional itu dicapai.

Fokus perhatian Tan Malaka dalam Program Nasional PKI bersifat menyeluruh, dalam konteks ekonomi fokus perhatiannya tertuju pada permasalahan kaum buruh, golongan miskin, dan juga petani. Usaha-usaha dalam perekonomian lebih dititikberatkan pada perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diselenggarakan oleh negara seperti koperasi atau lembaga perekonomian yang berwatak sosial. Selain itu dalam pembangunan pun harus direncanakan secara bertahap dan produksi dilaksanakan secara terencana oleh negara. Pengalihan aset swasta asing pun harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu peran serta rakyat dalam kehidupan negara melalui lembaga politik harus ditingkatkan. Dengan begitu, seandainya dengan program ini mampu menarik 50.000.000 penduduk Indonesia yang telah mempunyai kesadaran, disiplin dan politik, maka daya gerak dan juga perjuangan rakyat tidak bisa lagi dianggap remeh.

Berkaitan dengan Taktik/ Strategi, berhasil tidaknya sebuah program akan sangat ditentukan oleh benarnya taktik atau strategi yang digunakan. Taktik dan strategi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, dimana taktik merupakan bagian dari strategi. Taktik dan Strategi ini erat sekali kaitannya dengan konsep Massa Aksi yang dikemukakan Tan Malaka dalam bukunya Massa Actie. Taktik menurut Tan Malaka adalah berkaitan dengan operasi revolusioner pada suatu

tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Sedangkan strategi adalah jumlah operasi Revolusioner selama seluruh periode Revolusioner (Malaka, 2000 : 34).

Dalam Taktik- Strategi yang lebih teknis, Tan Malaka membaginya dalam pukulan Taktis dan juga pukulan Strategis. Pukulan taktis adalah menggunakan sebagian kekuatan untuk tujuan yang terbatas, hal tersebut dicontohkan dengan pemogokan yang dilakukan oleh VSTP pada 1923 dan juga rapat- rapat protes di Priangan. Pukulan taktis ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk adanya pukulan strategis. Sehingga menurut Tan Malaka pukulan strategis ini harus sesering mungkin dilakukan oleh organisasi- organisasi politik pada saat itu seperti PKI, Sarekat Rakyat, dan sarekat sekerja. Seandainya pukulan taktis yang dilakukan secara teratur dan terus menerus dilakukan terhadap Imperialis- kapitalis maka suatu waktu dimungkinkan untuk dilakukan pukulan Strategis.

Pukulan Strategis merupakan pukulan terakhir, dimana seluruh kekuatan dikerahkan untuk memperoleh kemenangan dengan cara mematahkan hubungan organisastoris musuh dan kemudian menghancurkannya. Untuk dapat melancarkan pukulan strategis maka akan sangat tergantung dari kualitas organisasi, dan juga keadaan politik, ekonomi, baik didalam maupun diluar negeri. Dalam sebuah pukulan strategi menurut Tan Malaka haruslah memenuhi syarat- syarat :

1. Partai memiliki disiplin baja.
2. Rakyat Indonesia dibawah Pimpinan PKI.
3. Musuh- musuh, baik didalam maupun diluar negeri terpecah- belah

(Malaka, 2000 : 45).

Syarat pertama yakni, disiplin Revolusioner yang dimaksud diatas adalah, adalah bahwa anggota partai harus mengerti kemutlakan ketaatan dalam pelaksanaan putusan yang walaupun hal tersebut bertentangan dengan pendapat pribadinya. Jadi sangat penting sekali adanya sebuah keputusan yang disepakati bersama sehingga dapat ditaati dan dilaksanakan oleh anggota dengan tanggung jawab.

Begitupun dalam halnya dengan syarat yang kedua, Tan Malaka beranggapan bahwa PKI merupakan satu-satunya partai yang dapat dikatakan sebagai partai rakyat Indonesia. Menurutnya hanya PKI lah yang bisa membentuk afdeling atau bagian di berbagai pulau di Indonesia. PKI menurutnya harus dapat mengorganisir semua lapisan masyarakat sehingga hal tersebut nantinya menimbulkan simpati pada PKI dan membuat masyarakat secara sadar untuk dapat berjuang bersama PKI baik pada saat ketika menang ataupun ketika kalah. Pada kesimpulannya, seandainya nanti partai telah berdisiplin dan sebagian besar penduduk telah berada dibawah pimpinan PKI maka langkah selanjutnya adalah mengetahui keadaan di pihak lawan baik didalam negeri ataupun diluar negeri.

Dalam kaitannya dengan kondisi lawan didalam negeri, Tan Malaka menganalisis bahwa kekuatan Imperialis Belanda (Militer, Ekonomi, Politik) tidak terpusat pada satu tempat saja, tetapi menyebar dibeberapa daerah. Untuk politik menurutnya ada di Jakarta, militer di Priangan atau Jawa Barat. Dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi justru Tan Malaka melihat bahwa tidak terdapat pemusatan ekonomi kapitalis didua tempat yang disebutkan diatas. Melihat peluang tersebut Tan Malaka berpendapat bahwa kekuatan ekonomi itu bisa

didapatkan didaerah yang termasuk dalam aliran Bengawan Solo seperti Jogja, Solo, Madiun, Kediri, dan Surabaya dimana ditempat tersebut dikatakannya terdapat industri- industri, perusahaan, badan-badan angkutan lalu lintas dan juga perbankan.

Untuk itu dalam suatu Offensif Revolusioner, Tan Malaka menyarankan untuk mengarahkan semua perjuangan ke lembah Bengawan solo, hal tersebut menurutnya sangat tepat karena untuk mendapatkan kemenangan politik, ekonomi, atau militer di dua tempat yakni Batavia (Jakarta) dan Juga Priangan (Jawa Barat) menurutnya sangat sulit untuk dilakukan. Karena menurutnya untuk dapat mendapatkan kemenangan politik dan juga militer, sekali lagi Tan Malaka mengatakan haruslah mempunyai persyaratan kekuatan ekonomi. Pada kesimpulannya dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi di lembah bengawan solo bagi kemerdekaan Indonesia maka haruslah dibarengi dengan upaya mengkoordinir dan mengorganisir buruh-buruh industri dan pertanian dan pada akhirnya melatih mereka untuk Massa Aksi yang langsung buat perampasan kekuasaan.

Dalam analisisnya mengenai kondisi lawan di luar negeri, Tan Malaka menganggap terdapatnya perpecahan dalam kaum borjuis di Eropa yang tergabung dalam partai- partai Konservatif, Liberal , dan partai radikal lainnya. Hal tersebutnya menurutnya bisa menjadi peluang dalam buat kemenangan Revolusi walaupun kemungkinan itu kecil, yang menarik dari analisisnya tentang situasi diluar negeri Tan Malaka sudah dapat memprediksi akan terjadinya pertentangan antara Imperialisme Jepang dan Amerika. Menurutnya besok atau

pun lusa kedua Imperialisme itu akan terlibat dalam peperangan untuk menentukan kekuasaannya atas lautan Pasifik. Akan tetapi mengenai kapan waktunya, Tan Malaka tidak bisa memprediksi kapan terjadinya perang antara Jepang dan Amerika tersebut. Hal tersebut pada nantinya akan menjadi kenyataan dimana Amerika dan juga Jepang terlibat dalam Perang Pasifik pada perang Dunia II.

Menurut Tan Malaka, terjadinya Perang Pasifik itu belum tentu bisa dikatakan merupakan waktu yang tepat untuk menuntut kemerdekaan, tetapi hal tersebut akan bergantung pada siapa yang akan menang dan berapa lama perang akan berlangsung. Sehingga dalam analisisnya mengenai situasi luar negeri, Tan Malaka mengatakan bahwa saat itulah merupakan waktu yang tepat untuk menuntut kemerdekaan nasional dengan pertimbangan :

1. Kita tidak dapat menggantungkan taktik revolusioner seluruhnya pada perang Jepang-Amerika. Taktik semacam itu bersifat oportunistis dan berbahaya, karena tidak diketahui kapan terjadinya perang tersebut. Terlebih lagi seandainya perang tersebut tidak menjadi kenyataan justru hal tersebut akan menimbulkan ketegangan psikologis pada rakyat Indonesia.
2. Ada kemungkinan perang antara Jepang-Amerika lama tak kunjung datang dan bahwa periode pasistis harus mendahului Revolusi Sosial di seluruh dunia. Jika menggantung Revolusi Nasional pada perang dunia dan Revolusi dunia, maka ada kemungkinan akan kehilangan peranan

pimpinan Indonesia atas kemerdekaan yang akan dicapai (Malaka, 2000 : 53-54).

Berdasarkan atas pertimbangan diatas dan juga atas dasar pertimbangan bahwa letak Indonesia yang sangat strategis baik secara politik dan juga ekonomi maka, menurut Tan Malaka sekarang waktu bagi PKI untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seandainya nanti harus terjadi perlawanan yang hebat, maka melalui organisasi politik dan juga organisasi serikat-serikat sekerja maka kemerdekaan itu akan dapat di capai dan dipertahankan.

2. PARI

Pasca pemberontakan PKI 1926/1927 yang dapat dikatakan gagal, banyak diantaranya para pemimpin juga anggota PKI yang ditangkap dan dibuang. Sejak saat itu pula penguasa kolonial semakin bertindak represif dimana setiap anasir pergerakan nasional ditindas, dan partai-partai politik yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dilarang. Helen Jarvis menggambarannya dengan :

Permulaan 1927 menyaksikan kehancuran pertama Partai Komunis Indonesia (PKI), segera setelah gagalnya pemberontakan Desember 1926 - Januari 1927. beberapa oknum di hukum mati, 13.000 orang ditangkap dan 1308 tersangka komunis dan keluarganya dikirim ke Boven Digul, kamp pembuangan di Irian Jaya. PKI permulaan 1920-an hancur lebur, karena aktivis mereka yang tidak dihukum mati atau ditangkap, mengasingkan diri atau lari dalam pembuangan (<http://tanmalakais.blogspot.com/>).

Tan Malaka sebagai pemimpin terkemuka PKI pada saat itu, sangat tidak setuju dengan adanya pemberontakan tersebut, dan bahkan dalam beberapa kesempatan mencoba untuk dapat mencegah terjadinya pemberontakan. Sikap penolakan Tan Malaka terhadap pemberontakan PKI tersebut menjadikan ia

sebagai sosok yang dimusuhi dan dikucilkan partai bahkan sampai ahir hidupnya. Hubungan antara Tan Malaka dan PKI berlangsung kurang harmonis bahkan cenderung saling menyerang satu sama lain. Salahsatu alasan penolakan Tan Malaka terhadap pemberontakan ini adalah lebih didasarkan atas analisisnya yang menganggap bahwa kekuatan pergerakan pada saat itu belum dapat dikatakan matang, selain itu dalam tubuh partai pun masih harus dilakukan banyak pembenahan guna menggalang basis massa yang kuat dan meluas (Zed dalam Tan Malaka Bapak Republik yang dilupakan : 147).

Dari tempat persembunyiannya di Singapura, pada tahun 1926 Tan Malaka menuliskan pandangannya mengenai Revolusi Indonesia dalam teori dan praktek pada sebuah buku yaitu Massa Aksi. Buku tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemberontakan PKI tersebut, tetapi karena keterbatasan dalam hal pencetakan lainnya, maka buku tersebut terlambat masuk ke Indonesia. Pada akhirnya buku tersebut justru menjadi sebuah jawaban atas gagalnya pemberontakan PKI 1926/1927, yang dikatakan bahwa hal tersebut merupakan blunder yang bisa menjadi bumerang terhadap partai sendiri ataupun terhadap partai lainnya. Pada kenyataannya memang terjadi demikian, bahwa PKI yang didirikan pada 1920 hancur dan para pemimpin dan anggotanya banyak yang dipenjara ataupun dibuang.

Setelah pemberontakan PKI yang gagal itu, pada tahun 1927 Tan Malaka mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) bersama Subakat dan Djamaluddin Tamim di Bangkok. Pendirian PARI pada awalnya dimaksudkan sebagai penerus semangat PKI sebelum pemberontakan yang mana Tan Malaka masih menaruh

banyak harapan akan sebuah partai revolusioner seperti PKI. Dalam anggaran dasar PARI dapat dilihat bahwa tujuan dari PARI adalah mencapai kemerdekaan penuh dan sempurna bagi Indonesia secepat mungkin, dan setelah itu membentuk Federasi Republik Indonesia, berdasarkan prinsip yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik negeri ini, dengan adat istiadat dan watak penduduk yang selanjutnya dirancang untuk memajukan kesejahteraan lahir dan batin rakyat Indonesia (Rambe, 2003 : 340).

Pernyataan tujuan ini lebih terlihat nasionalis dan tidak memberi dukungan terbuka kepada sosialisme atau komunisme. Begitupun dalam struktur partai yang diuraikan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar itu mengikuti model Sentralisme Demokrasi yang pada umumnya dihubungkan dengan komunis, dengan anggota diberi kebebasan berdiskusi dan meyakinkan sebelum keputusan diambil, tapi setelah itu, diwajibkan bekerja melaksanakan keputusan yang telah diambil, tanpa memperhatikan apakah anggota bersangkutan menentang atau mendukung garis yang diputuskan itu.

Selain itu, menurut Djamaluddin Tamim tujuan utama mendirikan PARI adalah menciptakan alat, “Jembatan Emas Tunggal” untuk mencapai negara Republik Indonesia yang merdeka 100%, untuk membuktikan garis Tan Malaka Juni 1924 yang diuraikan dalam Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia (<http://tanmalakais.blogspot.com>)).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar PARI tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut:

1. Mengikuti dan mempertahankan haluan politik revolusioner, seperti yang telah digariskan dan dijelaskan dalam manifesto dan program partai.
2. Mendirikan dan menyokong perkumpulan buruh, petani, pelajar, wanita dan pemuda dan juga bentukan non-proletar hingga apabila timbul krisis ekonomi dan politik bersama organisasi-organisasi seperti itu, menjadi barisan kekuatan dalam perjuangan untuk kemerdekaan, siap menarik dan memimpin rakyat Indonesia dalam massa aksi meningkat dalam frekuensi dan jangkauan sampai tujuan PARI tercapai.
3. Mendirikan kursus dan mempropagandakan tujuan PARI secara lisan maupun tulisan.
4. Menerbitkan surat kabar, surat edaran dan brosur untuk mempropagandakan dan menyatakan pandangan PARI mengenai masalah yang timbul dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan keadaan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia.
5. Menggunakan hak politik yang diberikan kepada rakyat Indonesia dan lembaga-lembaga politik dan juga hak dasar seperti mogok, melakukan demonstrasi dan boikot.
6. Bekerja sama dengan partai mana saja, didalam maupun diluar Indonesia, asal partai itu tidak merugikan atau menghalangi kemandirian atau aksi PARI.
7. Melakukan aksi yang dianggap PARI penting dan tepat (Rambe, 2003 : 340-341).

Dalam anggaran dasar PARI lebih lanjut ditegaskan bahwa PARI merupakan partai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada partai lain, dan bebas dari pimpinan dan pengaruh partai atau kekuasaan lain. Hal tersebut terlihat seperti bantahan terhadap dominasi dari Moskow dalam Anggaran Dasar PARI tidak disinggung-singgung tentang Komunisme, sosialisme, PKI atau gerakan komunis dunia. Tan Malaka menganggap bahwa sejak 1920-an Moskow tampak lebih peduli memanfaatkan Komintern untuk kepentingan hegemoni Soviet ketimbang membantu perjuangan bagi kemerdekaan daerah jajahan. Selain itu, penolakan Komintern akan Pan-Islamisme juga dipandang oleh Tan Malaka sebagai kecurigaan Komintern akan Pan-Islamisme yang akan menjadi pesaing dalam internasionalnya.

Susunan PARI sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sepertinya dirancang untuk operasi dibawah kondisi legal/terbuka, dengan ketentuan adanya rapat-rapat teratur, kongres dan sejenisnya dan pertukaran bebas gagasan tentang politik yang harus diperjuangkan partai. Tapi kenyataannya ialah bahwa PARI lahir di bawah ancaman pengejaran segera dan tidak pernah sanggup menyusun diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya. Sebagai contoh kongres partai sebagai kekuasaan tertinggi dalam partai yang mempunyai hak merubah dan memperbaiki anggaran dasar serta menentukan taktik-taktik politik nasional dan internasional samasekali tidak pernah terlaksana. Bahkan informasi tentang partai yang yang seharusnya dibuat dari bawah ke atas justru malah terjadi sebaliknya. Informasi ataupun instruksi mengenai partai lebih banyak di lakukan sepihak dari atas atau dari para pemimpin partai secara langsung tanpa adanya mimbar wacana dalam sebuah pertemuan. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang apabila kita lihat bahwa dari struktur dan program yang harus dilakukan menuntut partai untuk lebih terbuka dan tampil kepada khalayak. Sehingga hal tersebut tidaklah mengherankan walaupun beberapa tulisan maupun program partai berhasil masuk ke Indonesia tetapi PARI tidak pernah bisa menyentuh basis massa yang ada dibawahnya, bahkan dapat dikatakan bahwa untuk membentuk sebuah cabang pun sangat sulit.

Selain itu, penangkapan menjadi salahsatu faktor yang membuat PARI kurang bisa berkembang sejak didirikan. Tan Malaka sendiri tertangkap di manila beberapa hari kembalinya dari Bangkok tanggal 13 Agustus 1927, hampir dua bulan setelah PARI didirikan. Oktober 1929 Subakat ditangkap di Bangkok

diserahkan kepada penguasa Belanda untuk dihukum sampai menemui ajalnya di penjara Glodok. September 1932 Djamaluddin Tamim, anggota terakhir pimpinan pusat PARI yang masih bebas, ditangkap di Singapura oleh penguasa Inggris dan diserahkan kepada pihak Belanda untuk kemudian dikirim ke Boven Digul.

Pada perkembangannya, PARI tidak pernah menjadi partai massa seperti dimaksudkan para pendirinya. Beroperasi dengan pemimpin-pemimpinnya yang berada di luar negeri dan dibawah ancaman terus menerus, tidak hanya oleh penguasa Belanda, tapi juga oleh kekuatan imperialis lainnya di Asia Tenggara. PARI tidak pernah tumbuh menjadi suatu yang melebihi sebuah kelompok propaganda kecil. Para anggota dan wakil PARI demikian kuatir ditemukan, hingga mereka memakai cara-cara operasi gelap yang menempatkan rintangan-rintangan yang hampir tak teratasi antara mereka sendiri dengan rakyat yang hendak mereka capai

Dalam tahun-tahun terakhir pemerintah Belanda dan pendudukan Jepang, PARI merupakan sebuah kelompok kecil sehaluan dengan kelompok radikal di Jakarta yang mendapatkan inspirasinya dari riwayat hidup Tan Malaka. PARI mempunyai pengikut kuat dikalangan kelompok Menteng seperti, Soekarni, Pandu Kartawigoena, Adam Malik, Djohan Sjahroezah, Chaerul Saleh dll. Aksi yang dilakukan lebih ditujukan untuk memobilisasi massa untuk republik, yang dilaksanakan hanya tas pengertian radikal, aksi massa, tanpa partai baik diatas tanah ataupun dibawah tanah sebagai faktor pimpinan (Poeze, 2009 : 149-150). Jadi dalam hal ini lebih bersifat atas dasar ideologis saja bukan PARI sebagai sebuah partai atau organ perjuangan.

3. PERSATUAN PERJUANGAN

Fase perjuangan Tan Malaka pada masa sebelum Kemerdekaan Indonesia dapat dilihat lebih banyak berperan dibelakang layar. Hal tersebut berbeda dengan perjuangan pada fase setelah kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka mulai ikut aktif dalam perjuangan rakyat dan mulai memperkenalkan dirinya kepada umum. Pada awal Oktober setelah Proklamasi kemerdekaan sampai akhir tahun 1945 Tan Malaka mengadakan perjalanan dari Anyer ke Surabaya untuk melihat dan mengorganisir perlawanan rakyat. Dari perjalanannya tersebut, sampailah pada akhirnya berpendapat Tan Malaka berpendapat:

1. Kemauan Soekarno-Hatta tidak cocok dengan kemauan rakyat/pemuda seperti terbukti selama perjuangan rakyat/pemuda di Jakarta, Surabaya, Magelang dan lain-lain tempat.
2. Partai, Barisan, Badan yang timbul seperti jamur setelah partai diijinkan berdiri satu sama lainnya saling mencurigai, tuduh-menuduh, tangkap-menangkap, bahkan tembak-menembak.
3. Penangkapan atas diri Tan Malaka dengan tiada satu alasan apapun adalah satu bukti dari bersimeraja-lelanya kesalahpahaman, kecurigaan, dan kekacauan di antara sesama awak.
4. Propaganda tempat Tan Malaka bersembunyi seperti yang dilakukannya selama ini, akan terus terhalang oleh adanya Tan Malaka palsu alat propaganda Jepang-Belanda dalam rangka mengacaukan Revolusi (Tan Malaka, 2008 : 155-156).

Dalam analisisnya, Tan Malaka menganggap bahwa tampak sekali perbedaan antara kemauan rakyat untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dengan sikap para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, ataupun Sjahrir. Sebagai contoh, Tan Malaka sangat kecewa sekali terhadap sikap Soekarno ketika melarang para pemuda untuk melakukan perebutan dan penyitaan senjata dari tangan Jepang untuk mengisi kemerdekaan. Hal tersebut justru dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan organisasi militan menjadi lumpuh dimana setiap tindakan yang diketahui oleh Soekarno-Hatta dalam upaya merebut milik asing selalu ditolak.

Hal tersebut justru berbanding terbalik, menurut Tan Malaka laskar/pemuda yang jauh dari jangkauan Soekarno-Hatta dapat lebih berhasil dalam merebut milik asing. Selain itu kekecewaan Tan Malaka juga terjadi ketika para laskar/pemuda Surabaya yang sudah berhasil mengepung para serdadu Inggris-sekutu yang bersenjata lengkap justru harus dihentikan oleh para pemimpin di Jakarta itu. Keesokan harinya tentara sekutu yang sebelumnya hampir kalah justru berbalik memukul mundur tentara Republik Indonesia dan kemudian menguasai Surabaya. Sikap kehati-hatian dan ragu-ragu Soekarno-Hatta terhadap agresi asing pada saat itu membuat Tan Malaka ragu akan kemampuan dan kesanggupan mereka dalam Revolusi Indonesia (Malaka, 2008 : 147).

Munculnya partai politik ataupun badan selepas kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 1 November 1945. Sebagai akibat dari adanya maklumat tersebut adalah bermunculannya partai, laskar, dan badan perjuangan dimana satu sama lain saling curiga-mencurigai.

Selain itu, sebagai konsekuensi dari adanya maklumat tersebut adalah terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer, dan Sutan Sjahrir merupakan perdana menteri pertama. Mulai saat itulah terdapat perbedaan antara pemerintah yang diwakili Sjahrir dan Tan Malaka terutama dalam melihat cara berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perbedaan itu mulai terlihat ketika terjadinya pertempuran di Surabaya. Sjahrir menganggap bahwa banyaknya korban yang jatuh dalam pertempuran tersebut dapat digantikan dengan cara perundingan. Sedangkan Tan Malaka justru berpendapat lain bahwa justru pertempuran tersebut memperlihatkan semangat pengorbanan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengangkat senjata. Yang dirasa kurang hanyalah pengorganisasian bukan dengan perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah (Rambe, 2003 : 293).

Selain itu, Tan Malaka juga menyatakan ketidaksepatannya akan pendapat Sjahrir yang lebih mengedepankan pengakuan internasional melalui perundingan sebagai sesuatu yang dijalankan lewat diplomasi. Tan Malaka justru menganggap bahwa dengan hal tersebut justru menjadikan bangsa Indonesia yang pasif dan memberi kemungkinan untuk dijajah kembali oleh Belanda. Sehingga menurutnya politik diplomasi yang dilakukan adalah dengan diplomasi mengangkat senjata bukan dengan berunding.

Berdasarkan analisa akan kondisi pada saat itu, Tan Malaka menganggap diperlukan adanya sebuah kerjasama dalam satu badan yang dapat menampung semua unsur dan elemen dalam masyarakat. Untuk itu yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara mengundang seluruh kekuatan-

kekuatan dalam masyarakat untuk dihimpun dalam satu kerjasama untuk menciptakan adanya persatuan. Maka dari itu pada tanggal 3-5 Januari 1946 bertempat di Purwokerto diadakan kongres rakyat yang dihadiri oleh 138 organisasi (partai, tentara, laskar, badan). Hampir semua organisasi politik hadir dalam kongres ini hanya wakil pemerintah yang nampak tidak hadir. Dalam sidang tersebut Tan Malaka memberikan pidato tentang pentingnya persatuan dalam sebuah badan atau organisasi yang dapat menghimpun semua kekuatan perjuangan. Sesudah dua puluh tiga tahun, Tan Malaka berbicara kembali di depan umum. Pidato Tan Malaka ini dilukiskan oleh Moehammad Yamin dengan:

Beliau angkat bicara sebagai djago-lama, dengan memberi penerangan jang penoeh tindjauan jang dalam-dalam, berbitjara beralasan pengetahoean filosofi, sosiologi dan taktik. Tiga kali baliau angkat berbitjara tentang bentoekan serta soesoenan persatoean perdjoeangan rakyat atau volksfront. Orang tak menyangka bahwa beliau seorang ahli pidato jang berbitjara dengan soera toeroen-naik, menarik perhatian menoeroet soesosenan oratorik jang memakai permoelaan dan diiringi bagian tengah tentang penerangan politik dan selaloe berachir dengan penoetoeep jang bergelora... (Poeze, 2009 : 210).

Dalam kongres ini Tan Malaka menawarkan adanya Minimum Program yang terdiri dari tujuh butir yaitu :

1. Berunding atas dasar pengakuan Kemerdekaan 100%, sesudah tentara asing meninggalkan pantai dan lautan indonesia.
2. Pemerintahan rakyat.
3. Laskar rakyat.
4. Melucuti Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa
6. Mensita dan menyelenggarakan Pertanian (kebon)

7. Mensita dan menyelenggarakan perindustrian (pabrik, bengkel, tambang dll) (Poeze, 2009 : 218).

Butir pertama dalam minimum program menunjukkan adanya kesetaraan dalam kehidupan berbangsa. Setiap perundingan yang dilaksanakan haruslah didasarkan atas merdeka 100% , tanpa adanya itu Tan Malaka menganggap bahwa upaya dengan jalan perundingan lebih baik tidak dilakukan. Butir kedua dan ketiga, pemerintahan rakyat dan tentara rakyat menurut Tan Malaka harus mencegah pertentangan antara semangat perjuangan rakyat dengan pemerintah. Yang diperlukan pada saat itu adalah sebuah pemerintahan revolusioner yang sanggup melawan Imperialis Inggris-Belanda, selain itu pemerintahan rakyat yang dimaksud juga dalah pemerintah yang mendukung rakyatnya dalam berjuang. Butir keempat dan kelima menurut Tan Malaka adalah berusaha mencegah agar tentara Jepang tidak digunakan oleh sekutu untuk melawan republik. Selain itu hal tersebut juga harus dibarengi dengan pemulangan para tahanan Eropa. Dua butir terakhir, merupakan upaya untuk mengambil alih aset atau milik asing yang mana hal tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat.

Kongres yang dilaksanakan di Purwokerto ini merupakan babak baru atas perselisihan antara para pemimpin bangsa dalam melihat cara perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai oposisi terhadap pemerintahan pada saat itu. Sebagai contoh butir pertama dari minimum program merupakan jawaban atas politik berunding Sutan Sjahrir, begitupun dalam pengambilalihan aset asing hal tersebut juga merupakan jawaban atas maklumat yang dikeluarkan Hatta yang lebih melindungi milik asing di

republik. Jadi pada dasarnya adanya kongres di Purwokerto ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan yang mana masih didominasi oleh politik kepentingan dan mendapatkan pengaruh.

Pada tanggal 15-16 Januari 1946 diadakan kongres di Solo sebagai kelanjutan dari dari kongres yang dilaksanakan di Purwokerto. Kongres ini dihadiri oleh 141 organisasi. Dalam kongres ini disepakati untuk dibentuk sebuah organisasi nasional dengan nama Persatuan Perjuangan. Pemilihan nama ini dijelaskan oleh Tan Malaka dalam bukunya dari penjara ke penjara

Karena saya anggap, sampai sekarang dasarnya persatuan dalam menyelesaikan revolusi ini adalah perjuangan untuk menghadapi musuh bersama, sampai tercapai kemerdekaan 100% yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Jadi bukannya persatuan untuk berkompromi yang berarti berkhianat kepada kemerdekaan 100% menurut proklamasi 17 Agustus 1945, maka persatuan perjuangan itulah nama yang saya anggap paling tepat (Malaka, 2008 : 160).

Pada kongres yang dilaksanakan di Solo ini, Minimum Program ditetapkan sebagai program dari Persatuan Perjuangan dengan sedikit perubahan dari minimum program yang dihasilkan pada kongres Purwokerto. Tetapi secara kontent tidak berbeda jauh dengan minimum program sebelumnya, jumlah butir pun masih tetap 7 buah.

Pada perkembangannya, Persatuan Perjuangan menjadi organ perjuangan yang sangat di perhitungkan termasuk oleh pemerintah. Bahkan setelah kongres di Solo yang mendapat publikasi dari pers yang sangat besar. Pada saat yang sama pula KNIP menyatakan dukungannya terhadap minimum program yang diusung oleh Persatuan Perjuangan dan mengusulkan agar program tersebut menjadi program pemerintah. Pada prinsipnya, persatuan perjuangan mengingimkan agar

program PP tersebut dapat diterima oleh pemerintah sesuai dengan putusan kongres di Solo. Hal tersebut justru tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pemerintah terutama dari Hatta dan Sjahrir. Hatta beranggapan bahwa minimum program yang diusung PP sangat bertentangan dengan Maklumat yang telah dikeluarkan sebelumnya sehingga Hatta dan Sjahrir menolak minimum program tersebut.

Sebagai jawaban atas Minimum yang ditolaknya, Hatta dan Sjahrir mengumumkan lima program pokok pemerintah yang isinya hanya beberapa bagian saja yang mengakomodir program PP yang ada dalam minimum program. Pada perkembangan selanjutnya, walaupun pada awalnya banyak mendapatkan dukungan tetapi ketika hal tersebut tidak bisa sinergis dengan pemerintah yang berkuasa, sehebat dan sekuat apapun organisasi tersebut maka lambat laun PP pun mulai kehilangan peranannya dalam perpolitikan Indonesia.

Beberapa organisasi yang tergabung dalam PP seperti PSI, Gerakan Rakyat Indonesia, Buruh Tani Indonesia, Partai Katholik justru mulai berbalik mendukung pemerintah Sjahrir. Bahkan Masyumi pun ikut serta dengan mengirimkan wakilnya M Natsir sebagai menteri. Soedirman yang awalnya sangat mendukung persatuan perjuangan, pada akhirnya mulai menjaga jarak. Pada tanggal 17 Maret 1947 Tan Malaka ditangkap dengan tuduhan mengacau dan bertindak menggelisahkan. Empat bulan kemudian para pemimpin pemimpin PP pun ditangkap dengan tuduhan kudeta terhadap pemerintah Sjahrir. Dengan ditangkapnya Tan Malaka dan beberapa pemimpin dari PP, hal tersebut menandai bubarnya persatuan perjuangan dalam kancah perpolitikan Indonesia.

4. PARTAI MURBA

Partai Murba adalah partai politik Indonesia yang didirikan pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni dan Adam Malik. Pemilihan tanggal tersebut didasarkan bertepatan dengan terjadinya Revolusi Rusia. Partai Murba muncul setelah hancurnya PKI pasca pemberontakan 1948. Oleh karena itu terkadang Murba dicitrakan sebagai partai baru semacam semacam pengganti PKI, hal tersebutlah yang nantinya menyebabkan pertentangan antara PKI dan Tan Malaka semakin meruncing (Alfian, 2008 : 97).

Adapun nama Murba tersebut dalam tafsiran resmi Partai Murba yang didicetak dalam surat kabar Murba pada tanggal 20 Oktober 1948, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah murba adalah golongan rakyat terbanyak/terbesar diantara golongan dalam masyarakat Indonesia dan tiada lagi mempunyai apa-apa kecuali otak dan tenaganya sendiri. Istilah Murba lebih kurang sama dengan istilah proletar (Rambe, 2003 : 179).

Dalam anggaran dasarnya Parta Murba bertujuan untuk mempertahankan dan memperkokoh tegaknya kemerdekaan 100% bagi republik dan rakyat, sesuai dengan dengan dasar dan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, menuju masyarakat adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, ialah masyarakat Sosialis (Rambe, 2003 : 346).

Program yang digagas oleh partai Murba tidaklah berbeda jauh dengan minimum program yang ditetapkan oleh Persatuan Perjuangan. Hal tersebut tidaklah mengherankan bahwa Partai Murba dapat dianggap sebagai partai dan

organ perjuangan lanjutan Tan Malaka untuk mencapai Revolusi Indonesia seperti yang dicita-citakannya. Program tersebut antara lain:

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100% sesudah tentara asing meninggalkan daratan, lautan, dan udara Indonesia.
2. Pemerintah Rakyat(dalam artian sesuainya haluan pemerintah dengan rakyat).
3. Tentara Rakyat(dalam artian sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Mobilisasi Umum dan mempersenjatai rakyat.
5. Mensita dan menyelenggarakan pertanian musuh.
6. Mensita dan menyelenggarakan perindustrian musuh.
7. Melaksanakan ekonomi berjuang (Rambe, 2003 : 347).

Tan Malaka dapat dikatakan tidak pernah berhasil dalam membesarkan Partai Murba karena 3 bulan setelah mendirikan partai, Tan Malaka ditembak mati di Kediri, Jawa Timur. Begitupun dengan partainya, walaupun didukung oleh tokoh-tokoh pemuda revolusioner yang setia terhadap Tan Malaka seperti Soekarni, Chaerul Saleh, dan Iwa Kusumasumatri tetap saja partai ini tidap dapat dikatakan berkembang lebih besar. Beberapa upaya untuk penggabungan dengan PKI sempat diupayakan, tetapi penolakan atas dasar ideologi yang tidak berdasar menjadikan usaha tersebut tidak pernah terlaksana.